

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk serta memperkenankan sehingga kita menyelesaikan Evaluasi dan Review Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2018 Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung.

Evaluasi dan Review Renstra merupakan sinkronisasi Program dan kegiatan sebagai tindak lanjut perubahan Peraturan Perundang-undangan dan Perubahan SOTK.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Evaluasi dan Review Renstra ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan.

Akhirnya kami berharap semoga Evaluasi dan Review Renstra Tahun 2014-2018 ini dapat berguna dan bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Bansari, April 2016

CAMAT BANSARI

M. JA'FAR KHUDHORI, S.Sos.

Pembina Tk.I

NIP. 19670707 198803 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan tujuan	4
1.4 Hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya	4
1.5 Sistematika penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BANSARI	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Bansari	7
2.2 Sumber daya Kecamatan Bansari	15
2.3 Kinerja pelayanan Kecamatan Bansari	18
2.4 Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Bansari	22
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	23
3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Bansari.....	23
3.2 Telaah Visi, Misi dan program Bupati Temanggung	24
3.3 Penentuan Isu-isu strategis	29
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	31
4.1 Visi dan Misi Kecamatan Bansari	31
4.2 Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Bansari	33
4.3 Strategi dan Kebijakan	38
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	42
BAB VI INDIKATOR KINERJA KECAMATAN BANSARI	57
BAB VII PENUTUP	60

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran I Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Bansari (2013 – 2018)	61
Lampiran II BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM KECAMATAN BANSARI PENYUSUNAN RENSTRA KECAMATAN BANSARI.....	1
Lampiran III BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM KECAMATAN BANSARI.....	3
Lampiran IV BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM SKPD.....	4
Lampiran V BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM KOMUNIKASI KECAMATAN BANSARI.....	8

DAFTAR TABEL DAN DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL :

Tabel I 2.2.1	Kendaraan Dinas yang dimiliki Kecamatan Bansari.....	15
Tabel II 2.2.2	Perlengkapan / peralatan kantor yang dimiliki Kecamatan Bansari.....	16
Tabel III 2.2.3	Tabel Bangunan.....	17
Tabel IV 2.3.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bansari	18
Tabel V 2.3.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Bansari	21
Tabel VI 3.1	Identifikasi Permasalahan Kecamatan Bansari	23
Tabel VII 3.2	Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Bansari Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.....	38
Tabel VII 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Tahun 2013 – 2018.....	45
Tabel VIII 4.3.	Strategi dan kebijakan Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Tahun 2013 – 2018	52
Tabel IX 5.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Pendanaan Indikatif Kecamatan Bansari.....	56
Tabel X 6.1	INDIKATOR KINERJA KECAMATAN BANSARI	66

DAFTAR GAMBAR BAGAN ORGANISASI KECAMATAN BANSARI KABUPATEN TEMANGGUNG	24
--	----

Bab 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kecamatan Bansari merupakan wilayah Kecamatan yang ada di bagian tengah paling barat arahnya hanya satu pintu dari Kota Kabupaten yaitu melalui Kecamatan Parakan, dan wilayahnya berada di daerah pengunungan (lereng gunung Sindoro) yang penduduknya pada umumnya adalah petani dan terdiri 13 desa. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis SKPD.

Renstra SKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan Renstra diperlukan masukan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berupa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan SKPD berjangka 5 (lima) tahun yang memuat kondisi pelayanan SKPD, gambaran visi dan misi serta rencana pembangunan SKPD untuk 5 (lima) tahun yang akan datang.

Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan penjabaran RPJMD oleh SKPD. Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh SKPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renstra SKPD disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di SKPD berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab SKPD.

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh

berkembang di Kecamatan Bansari dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun di Tahun 2014 - 2018.

1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Bansari Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 9) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
- 10) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
- 11) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 12) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 22) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 23) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 24) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 25) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014;
- 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 28) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung;
- 29) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
- 30) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
- 31) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

- 32) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
- 33) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014.
- 34) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014;
- 35) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018 di susun dengan maksud :

- Memberikan arah pembangunan jangka menengah (Tahun 2014 – 2018) dan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja selama 5 (lima) tahun Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung;
- Menjadi acuan dan tolok ukur kinerja Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Strategis Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Tahun 2014 - 2018 disusun dengan tujuan :

- Menjabarkan Visi dan Misi dalam rangka mewujudkan Kecamatan Bansari menuju Temanggung Sebagai Daerah Agraris Berwawasan lingkungan, masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera dengan Pemerintahan Yang Bersih melalui kebijakan dan program yang dilaksanakan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfaatkan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif;
- Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung.

1.4 HUBUNGAN RENSTRA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Untuk mewujudkan suatu dokumen perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan yang utuh dengan sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Rencana Strategis Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Tahun 2014 - 2018 disusun dengan memperhatikan dan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018 terdiri dari 7 (tujuh) bab. Secara garis besar sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bagian ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya serta maksud dan tujuan.

Bab II. Gambaran pelayanan Kecamatan Bansari

Bagian ini memaparkan Tugas, Fungsi dan struktur organisasi Kecamatan Bansari, Sumber daya Kecamatan Bansari, Kinerja pelayanan Kecamatan Bansari, Tantangan dan Peluang pengembangan Pelayanan Kecamatan Bansari.

Bab III. Isu – isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bagian ini memaparkan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Bansari, Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati Temanggung, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bagian ini menjelaskan Visi dan Misi Kecamatan Bansari tahun 2014 - 2018 yang merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih. Pada bagian ini juga diuraikan tujuan dan sasaran jangka panjang menengah Kecamatan Bansari, strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta kebijakan dari setiap strategi terpilih.

Bab V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Bagian ini memaparkan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Tahun 2014 - 2018. Pada bagian ini, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja program

pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan beserta kebutuhan pendanaannya.

Bab VI. Indikator Kinerja

Bagian ini menguraikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kecamatan Bansari pada akhir periode masa jabatan Kepala Daerah terpilih, dengan menggambarkan akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah atau indikator capaian yang bersifat mandiri sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Bab VII. Penutup

Bagian ini menjelaskan dengan singkat definisi, fungsi, dan peran dari dokumen Renstra yang telah ditetapkan.

Bab 2

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BANSARI

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BANSARI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan tata kerja Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung, dan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 74 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Temanggung yaitu sebagai berikut :

Susunan Organisasi dan Tugas Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung terdiri dari :

- 1) Tugas Pokok dan Fungsi Camat adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
 - a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di kecamatan;
- b. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
- c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- d. Pengoordinasian kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pelayanan lintas lingkungan kecamatan;

- e. Penyusunan program, pembinaan administrasi ketatalaksanaan dan rumah tangga kecamatan;
- f. Penyelenggaraan kesekretariatan kecamatan;
- g. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pemerintahan daerah di kecamatan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi :

- a. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- c. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, meliputi :

- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, meliputi :

- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- b. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- c. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan, meliputi :

- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
- d. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, meliputi :

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

- b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
- e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan ditingkat kecamatan;
- f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan ditingkat kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan, meliputi :

- a. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- b. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Selain tugas diatas, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

- a. Perijinan;
- b. Rekomendasi;
- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;
- e. Pengawasan;
- f. Fasilitasi;
- g. Penetapan;

- h. Penyelenggaraan;
 - i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.
- 2) Tugas Sekretaris Camat adalah melaksanakan sebagian tugas Camat yang meliputi koordinasi, pengendalian, perencanaan, pengelolaan, administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian serta pemerintahan daerah di wilayah kecamatan, sedangkan Fungsi Sekretaris Camat adalah :
- a. Pengoordinasian perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. Pengoordinasian penyusunan, pengolahan dan pelayanan data;
 - c. Pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
 - e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pemerintahan daerah dengan satuan kerja di lingkungan kecamatan;
 - f. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Camat.
- 3) Tugas Subbagian Perencanaan adalah melaksanakan sebagian tugas Sekretaris yang meliputi perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi program dan/atau kegiatan kecamatan.
- 4) Tugas Subbagian Keuangan adalah melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam penyusunan rencana anggaran, melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan kecamatan.
- 5) Tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian adalah melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, kearsipan, perlengkapan, dokumentasi, perjalanan dinas, organisasi dan tata laksana serta kepegawaian kecamatan.
- 6) Tugas Seksi Tata Pemerintahan adalah menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan serta fasilitasi pembinaan pemerintahan desa, sedangkan fungsinya adalah :
- a. Pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
 - b. Pengoordinasian teknis operasional kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas di wilayah kerjanya;
 - c. Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

- d. Fasilitasi dan pengoordinasian pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- e. Penilaian atas laporan keterangan pertanggung jawaban Kepala Desa.
- f. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa;
- g. Fasilitasi penataan desa/kelurahan;
- h. Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa;
- i. Penyelenggaraan lomba/penilaian desa/kelurahan tingkat kecamatan;
- j. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan;
- k. Pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- l. Pertimbangan pengangkatan Lurah;
- m. Pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu dengan pemerintah desa dan kelurahan;
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

7) Tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah melaksanakan pembinaan pembangunan dibidang perekonomian kecamatan, produksi dan distribusi bahan makanan/kebutuhan hidup masyarakat, sedangkan fungsinya adalah :

- a. Fasilitasi dan koordinasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya;
- b. Fasilitasi pengembangan perekonomian desa/kelurahan;
- c. Pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- d. Pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha kecil menengah dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan;
- e. Pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian;
- f. Pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

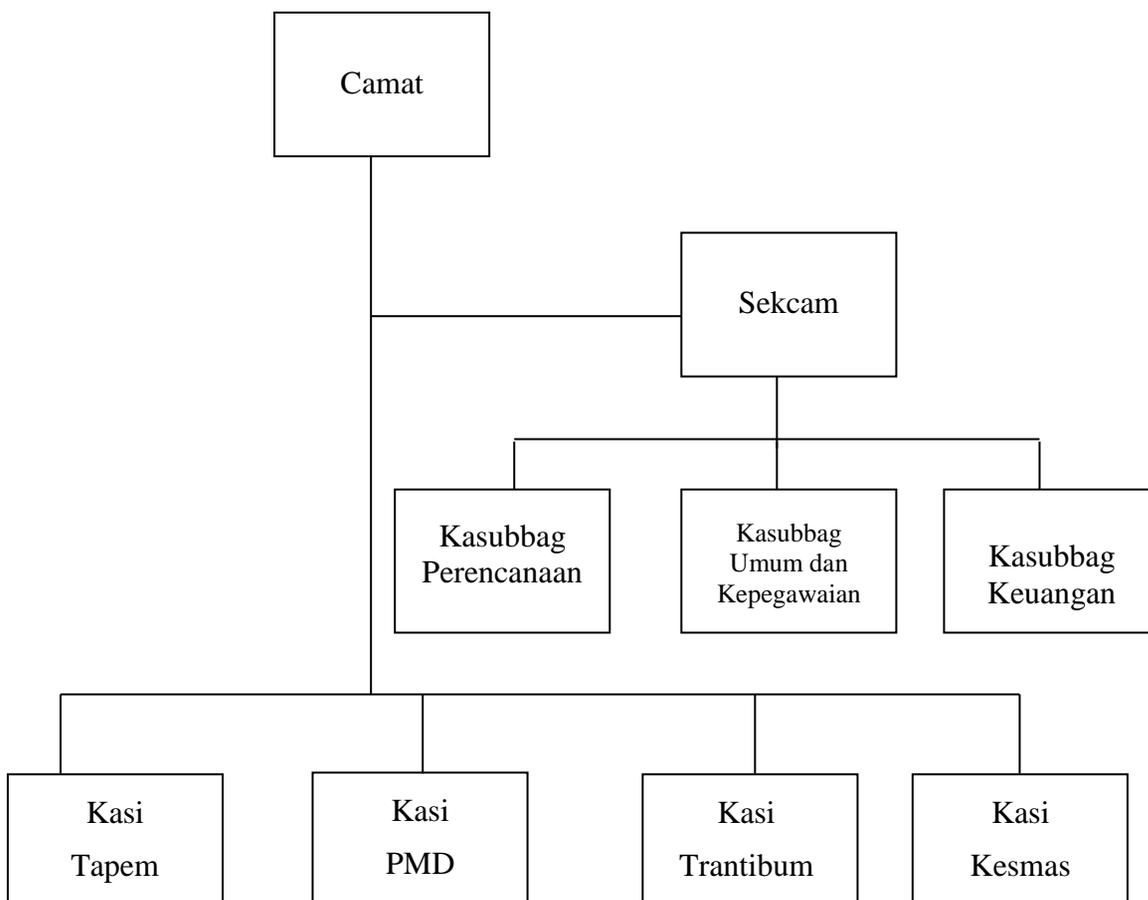
- 8) Tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah melaksanakan pembinaan keamanan dan ketertiban wilayah serta pembinaan Polisi Pamong Praja, sedangkan fungsinya adalah :
- a. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja;
 - c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat (LINMAS) di wilayah kerjanya;
 - e. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
 - f. Penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati serta peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
 - g. Penanganan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
 - h. Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
 - i. Pemberian rekomendasi dan/atau perijinan tertentu;
 - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- 9) Tugas Seksi Kesejahteraan Masyarakat adalah mengoordinasikan penyusunan program serta melaksanakan pembinaan kesejahteraan masyarakat, sedangkan fungsinya adalah :
- a. Fasilitasi penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar;
 - b. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
 - c. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat;
 - d. Fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan;
 - e. Penyelenggaraan keluarga berencana;
 - f. Pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar;
 - g. Pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
 - h. Fasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
 - i. Penanggulangan masalah sosial;
 - j. Fasilitasi kegiatan keagamaan dan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
 - k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Struktur organisasi Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung terdiri dari:

- 1) Camat
- 2) Sekretaris Kecamatan
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Kepala Sub Bagian Keuangan.
- 3) Kepala Seksi Tata Pemerintahan
- 4) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 5) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 6) Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Struktur organisasi Kecamatan Bansari sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut :

Bagan Struktur Organisasi
Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung



2.2 SUMBER DAYA KECAMATAN BANSARI

Untuk menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan Bansari maka dibutuhkan dukungan sumber daya, sumber daya di Kecamatan Bansari ada sumber daya manusia dan sumber daya penunjang berupa sarana dan prasarana untuk mencapai kinerja yang memadai. Kondisi sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada di Kecamatan Bansari dapat digambarkan melalui tabel 2.2 berikut:

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di Kecamatan Bansari dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.2.1
Kondisi Sumber Daya Manusia
Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Tahun 2014

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	%
1	2	3	4
1.	Kondisi pegawai berdasarkan: Kualisasi Pendidikan		
	a. SD	1	3
	b. SMP	1	3
	c. SMA	19	69
	d. Sarjana Muda (D-III)	2	7
	e. S-1 dan D-IV	3	11
	f. S-2	2	7
	Jumlah	28	100
2.	Pangkat/Golongan Ruang		
	a. Gol I	2	7
	b. Gol II	11	39
	c. Gol III	13	47
	d. Gol IV	2	7
	Jumlah	28	100
3.	Jabatan		
	a. Eselon III	2	7
	b. Eselon IV	7	25
	c. Jabatan Fungsional Umum	19	68
	Jumlah	28	100
	JUMLAH	28	

Sumber : Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Tahun 2014

Dari tabel di atas dapat digambarkan bahwa Kecamatan Bansari belum didukung dengan kuantitas sumber daya manusia yang mencukupi.

2.2.2 Sumber Daya Selain Manusia

Sumber daya selain manusia berupa sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Bansari dapat digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel 2.2.2.
Kondisi Sarana dan Prasarana
Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Tahun 2014

Nama/Jenis Barang	Type/Merk	Jml	Kondisi			Ket
			Baik	RR	RB	
2	3	4	5	6	7	8
KENDARAAN						
Kendaraan roda 4		1	1			
Kendaraan roda 2		18	18			
ELEKTRONIK						
Righ		1	1			
Telepon		1	1			
Antene		1	1			
Televisi 21 inch		1	1			
Mike	ICOM	1	1			
MEUBELAIR	Panaphon					
Meja Kursi		36	36			
Lemari Kayu	Sharp	10	10			
Meja Rapat	Aiwa	2	2			
Meja Pelayanan		2	2			
Kursi Rapat		21	21			
Filling Kabinet Besi		8	8			
Kursi Eselon IV		2	2			
PERALATAN						
KANTOR	Kayu	4	1			
Mesin Ketik		5	4			
Mesin Computer		5	5			
Mesin Printer		3	3			
Meja Computer	Olliverty	1	1		3	
LCD		2	2	1		
Laptop		1	1			
Faximili	Olivetti	1	1			
Genset	Tosiba Tosib & Lenovo Brother Sogo					

Sumber : Dokumen Pemegang Barang tahun 2014

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang tersebut diatas dirasakan masih belum memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bansari.

Ketersediaan sumber daya manusia yang didukung oleh

ketersediaan sarana dan prasarana penunjang tersebut diatas merupakan salah satu kunci pokok bagi pencapaian target kinerja Kecamatan Bansari baik yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Bansari Tahun 2014-2018 maupun didalam Renja Kecamatan Bansari Tahun 2015.

2.2.3 Tabel Bangunan

Sumber daya manusia dan sumber daya selain manusia, Kecamatan Bansari juga tersedia bangunan. Berikut ini tabel Bangunan Kecamatan Bansari :

Tabel 2.2.3
Bagunan yang dimiliki Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung

No	Jenis	Kondisi	Luas
1	Bangunan Gedung kantor ,	B	1030
2	Bangunan rumah dinas	B	200
3	Tempat parker	B	200

2.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN BANSARI

2.3.1 Capaian Kinerja Kecamatan Bansari Tahun 2009 – 2013

Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung berdasarkan rencana strategi Kecamatan Bansari tahun 2009 – 2013 dan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2009 – 2013 dengan indikator sesuai urusan yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Bansari sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.3.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bansari
Kabupaten Temanggung Tahun 2009 - 2013

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan Fungsi SKPD	Target Renstra SKPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
		Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1	Terciptanya ketahanan pangan			13 desa	13 desa				13 desa	13 desa				100 %	100 %	
2	Penurunan kasus SARA dan persentase peserta kegiatan politik masyarakat			13 desa	13 desa				13 desa	13 desa				100 %	100 %	
3	Penanganan bencana alam			13 desa	13 desa				13 desa	13 desa				100 %	100 %	
4	Cakupan fasilitas pelaksanaan tri kerukunan umat beragama dan cakupan fasilitasi pelaksanaan peribadatan			13 desa	13 desa				13 desa	13 desa				100 %	100 %	
5	Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam teknologi tepat guna dan persentase			13 desa	13 desa				13 desa	13 desa				100 %	100 %	

	menurunnya rumah tangga sasaran															
6	Cakupan perencanaan pembangunan desa yang partisipatif dan persentase rumah tangga sasaran dalam Musrenbang			13 desa	13 desa				13 desa	13 desa				100 %	100 %	
7	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti			13 desa	13 desa				13 desa	13 desa				100 %	100 %	
8	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa tingkat dasar			1 SD /MI	1 SD /MI				1 SD /MI	1 SD /MI				100 %	100 %	
9	Persentase anggaran penata usahaan SKPD terhadap total belanja langsung SKPD dalam 1 (satu) tahun			100 %	100 %				100 %	100 %				100 %	100 %	
10	Rasio realisasi pendapatan daerah terhadap potensi pendapatan daerah			13 desa	13 desa				13 desa	13 desa				100 %	100 %	
11	Persentase tersusunnya dokumen pelaporan daerah			100 %	100 %				100 %	100 %				100 %	100 %	
12	Cakupan pembinaan administrasi desa			13 desa	13 desa				13 desa	13 desa				100 %	100 %	
13	Persentase pengisian jabatan kepala desa yang kosong dan Persentase pengisian jabatan perangkat desa yang kosong			100 %	100 %				100 %	100 %				100 %	100 %	
14	Cakupan penertiban Kartu Keluarga (KK),Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran,Akta Kematian dan persentase penanganan pengaduan masyarakat			13 desa	13 desa				13 desa	13 desa				100 %	100 %	

15	Rasio dokumen perencanaan pembangunan daerah			100 %	100 %				100 %	100 %				100 %	100 %	
16	Besaran ketersediaan data statistik			13 desa	13 desa				13 desa	13 desa				100 %	100 %	
17	Tertib administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan	13 desa	13 desa				13 desa	13 desa				100 %	100 %			
18	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1 SD /MI	1 SD /MI				1 SD /MI	1 SD /MI				100 %	100 %			
19	Terpenuhi target pendapatan 100 %	100 %	100 %				100 %	100 %				100 %	100 %			
20	Berkurangnya angka kriminal di Desa / Kelurahan	13 desa	13 desa				13 desa	13 desa				100 %	100 %			
21	Tumbuhnya wawasan kebangsaan di masyarakat	100 %	100 %				100 %	100 %				100 %	100 %			
22	Meningkatnya kesejahteraan pegawai	100 %	100 %				100 %	100 %				100 %	100 %			
23	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur pemerintah kecamatan	100 %	100 %				100 %	100 %				100 %	100 %			
24	Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah kecamatan	100 %	100 %				100 %	100 %				100 %	100 %			

Dari tabel diatas diketahui keberhasilan semua indikator tercapai sampai pada tahun 2013, hal ini dipengaruhi oleh kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung program-program Pembangunan.

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Bansari Tahun 2009 – 2013

Analisis pengelolaan pendanaan pelayanan Kecamatan Bansari melalui pelaksanaan renstra Kecamatan Bansari tahun 2009-2013 untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut pada tabel 2.3.2.

Tabel 2.3.2.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Bansari
Kabupaten Temanggung Tahun 2009 - 2013

Uraian	Anggaran pada tahun ke –					Realisasi anggaran pada tahun ke -					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-					Rata – rata pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	anggaran	realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Anggaran Kecamatan Bansari	804.99 3.328	1.221.43 3.789	1.326.20 6.872	1.428.92 0.000		803.14 4.707	1.213.53 0.240	1.301.3 99.833	1.412.17 1.769		99,78	99,35	98,13	98,83			

Dari tabel diatas terlihat rasio antara realisasi dan anggaran dari tahun 2009 – 2013 terlihat cukup stabil hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran di Kecamatan Bansari.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KECAMATAN BANSARI

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Bansari tahun 2014 – 2018 sebagai berikut :

1. Tantangan

- Masyarakat Kecamatan Bansari masih mendominasi pertanian tembakau;
- Harga hasil pertanian tidak menentu, banyak merugikan petani;
- Kurangnya sarana transportasi (angkutan umum);
- Harga pupuk terus melambung;
- Tenaga kerja produktif banyak yang mencari penghasilan di luar wilayah;
- Pemasaran hasil pertanian kurang;
- Minimnya ketrampilan yang dimiliki warga;
- Kurangnya peran kelembagaan;
- Meningkatnya kerawanan narkoba.

2. Peluang

- Komitmen pemerintah, untuk mendukung RPJMD;
- Komitmen mitra kerja (UPTD, TP PKK, Kepala Desa, dan LSOM lainnya);
- Adanya dukungan yang kuat dari berbagai lembaga kemasyarakatan untuk mencapai Visi dan Misi;
- Tanah pertanian yang produktif;
- Hasil pertanian yang bisa ditingkatkan/dikembangkan;
- SDM tinggi tapi belum terlatih;
- Organisasi dan kelembagaan di masing-masing desa;
- Jangkauan pemasaran yang lebih luas.

Bab 3

ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Bansari

Permasalahan umum yang dihadapi oleh Kecamatan Bansari antara lain :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung

Aspek kajian	Capaian / kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan SKPD
			Internal (kewenangan SKPD)	Eksternal (diluar kewenangan SKPD)	
Terlaksananya penyusunan laporan dan lain sebagainya	Laporan dan lain sebagainya disusun ala kadarnya	-	Kurangnya staf yang memahami penguasaan komputer	Hanya sebagian kecil yang berusaha memahaminya	Terbatasnya staf/karyawan
Terlaksananya anggaran rutin	anggaran yang ada berdasarkan PPAS/plafon		Masih rendahnya kualitas SDM	Sarana transportasi sangat terbatas	Kualitas aparatur kurang maksimal
Terlaksananya kegiatan di luar dinas	Terlaksananya kegiatan di luar dinas banyak yang minta bantuan		Terbatasnya anggaran untuk kegiatan di luar dinas	Banyak organisasi/kelembagaan yang sering minta bantuan	Terbatasnya anggaran untuk kegiatan di luar dinas

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih

KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2014 - 2018

VISI

“TERWUJUDNYA TEMANGGUNG SEBAGAI DAERAH AGRARIS BERWAWASAN LINGKUNGAN, MEMILIKI MASYARAKAT AGAMIS, BERBUDAYA, DAN SEJAHTERA DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH”

Daerah agraris berwawasan lingkungan merupakan sebuah kondisi daerah yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi daerah yang secara ekonomi bertumpu pada sektor pertanian sebagai penggerak utama perekonomian daerah dan tumpuan kehidupan masyarakat. Sebagai sektor penggerak perekonomian daerah maka pengembangan sektor pertanian tetap dengan memperhatikan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Masyarakat Agamis merupakan sebuah kondisi masyarakat yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi dimana selain terpenuhinya kebutuhan jasmani masyarakat Kabupaten Temanggung, namun juga terpenuhinya kebutuhan rohani yang ditandai dengan sikap dan akhlak mulia yang sesuai dengan pemahaman, penghayatan, pengamalan ajaran agama, dan didukung dengan kebebasan menjalankan ajaran agama, serta toleransi antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga diharapkan seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Temanggung selalu tidak meninggalkan norma-norma agama.

Berbudaya merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi masyarakat yang memiliki budaya sehat, budaya peduli pendidikan, budaya kebersihan lingkungan khususnya tempat tinggal dan lingkungan perumahan, dan budaya peduli atas lingkungan sosial kemasyarakatan dan kebudayaan yang berkembang di lingkungan sekitarnya.

Sejahtera merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi masyarakat dimana seluruh individu masyarakat dapat mencukupi kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat karena terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, dan religius. Sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Pemerintahan yang bersih merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi pelaksanaan pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sesuai dengan arah pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga terwujud pemerintahan yang bersih di semua aspek pelaksanaan pemerintahan.

MISI

Untuk mewujudkan Visi Daerah Kabupaten Temanggung di atas, pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dilakukan dalam 6 (enam) Misi Daerah, yaitu:

1. Mewujudkan Pertanian Modern yang Berwawasan Lingkungan;
2. Mewujudkan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera;
3. Mewujudkan Infrastruktur Permukiman Perdesaan dan Perkotaan yang Layak dan Berwawasan Lingkungan;
4. Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas tanpa Meninggalkan Kearifan Lokal;
5. Mewujudkan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat;
6. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut di atas, maka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Tahun 2014 - 2018 harus memiliki langkah, gerak, arah, semangat, dan dinamika yang sama.

Disamping hal tersebut, pelaksanaan pembangunan juga memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari: keterkaitan, keseimbangan, dan keadilan. Keterkaitan diartikan sebagai keterkaitan antar wilayah, antar sector, antar tingkat pemerintahan, dan antar pemangku kepentingan pembangunan. Keseimbangan diartikan sebagai keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Keadilan diartikan sebagai keadilan antar kelompok masyarakat dan generasi.

Untuk menyatukan langkah, gerak, arah, semangat, dan dinamika para pemangku kepentingan pembangunan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Temanggung menetapkan sebuah tekad pembangunan yang dituangkan dalam sebuah Motto yaitu:

“BERSAMA MEMBANGUN TEMANGGUNG”

Sebuah tekad yang mengandung pemahaman bahwa pembangunan daerah merupakan tanggung-jawab bersama seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Menelaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun mendatang dan untuk mengidentifikasi faktor – faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Telaahan sebagaimana dimaksud tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3.2
Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Bansari
Terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Visi : TERWUJUDNYA TEMANGGUNG SEBAGAI DAERAH AGRARIS BERWAWASAN LINGKUNGAN, MEMILIKI MASYARAKAT AGAMIS, BERBUDAYA, DAN SEJAHTERA DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH				
NO	Isi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 1 : Mewujudkan Pertanian Moderen yang Berwawasan Lingkungan;			
A	Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan	Terbatasnya sdm petani	Petani hanya mengandalkan komoditas tembakau	UU yang berkaitan dengan pertembakauan
2	Misi 2 : Mewujudkan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera			
A	Program pemeliharaan kamtramtibmas dan pencegahan tindak kriminal	Terbatasnya sdm Linmas/Hansip di desa	Masih rendahnya kualitas tenaga Linmas/Hansip	
B	Program pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam	Terbatasnya sdm Kader	Masih rendahnya pengetahuan dan kemampuan kader	

C	Program pengembangan nilai keagamaan	Terbatasnya sarana dan prasarana keagamaan	Rendahnya anggaran yang dimiliki	
D	Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	Program pemerintah lewat Kelembagaan belum bisa dinikmati oleh masyarakat luas	Minimnya sdm kelembagaan	
E	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan	Hanya sebagian kecil masyarakat yang benar benar partisipatif dalam rangka perumusan atau percepatan pembangunan	Kurangnya kualitas sdm masyarakat desa	Peraturan bupati tentang tim teknis PUG
3.	Misi 3 : Mewujudkan peningkatan infrastruktur pemukiman perdesaan dan perkotaan yang layak dan berwawasan lingkungan			
A	Program pengendalian dan perusakan lingkungan hidup	Kurangnya pemanfaatan halaman	Masyarakat kurang peduli terhadap lingkungan rumah	
4.	Misi 5 : Mewujudkan budaya sehat dan aksesibilitas kesehatan masyarakat			
A.	Program upaya kesehatan masyarakat	Masih rendahnya perilaku hidup bersih, sehat	Terbatasnya pengetahuan	
5	Misi 6 : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, tidak KKN, dan berorientasi pada pelayanan publik			
A.	Program pelayanan administrasi perkantoran	Masih kurangnya kebuthan dalam	Terbatasnya anggaran yang	

		pelayanan perkantoran	ada	
B.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Masih kurangnya sarana dan prasarana perkantoran	Terbatasnya sarana dan anggaran yang dimiliki	
C.	Program peningkatan disiplin aparatur	Terbatasnya pakaian dinas yang dimiliki	Alokasi untuk pakaian dinas dan pakaian khusus hari-hari tertentu hanya sekali dalam 2 (dua) tahun	
D	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Sering terlambatnya pembayaran pajak khususnya PBB oleh masyarakat	Mengandalkan setelah panen tembakau	Adanya program pemerintah tentang pencegahan HIV / AIDS
E	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Terbatasnya sdm masyarakat terhadap perijinan	Banyak bangunan atau usaha yang belum ada ijinnya	Menjadi target rpjmd dan SPM
F	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Kurang tertibnya administrasi pemerintahan desa	Masih rendahnya kualitas sdm perangkat desa	
G	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	Pengisian kekosongan Kades dan perdes yang tidak terjadwal	Prediksi kekosongan kades dan perdes sulit diprediksi	
H	Program penataan administrasi kependudukan	Perlu penanganan khusus untuk memenuhi target terhadap pelayanan	Masih rendahnya kesadaran terhadap	

		kependudukan	kepemilikan akte kelahiran, akte nikah	
I	Program perencanaan pembangunan daerah	Terbatasnya sdm personil di bidang perencanaan	Terbatasnya Pembinaan, Bintek dan evaluasi	
J	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Terbatasnya sdm	Kurang falidnya Sumber informasi dalam pengolahan data	

3.3 Penentuan Isu – isu Strategis

Isu – isu strategis pelayanan Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018 dilakukan oleh Kecamatan Bansari dengan menggunakan metoda pembobotan dirumuskan isu isu strategis pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan melalui dengan melibatkan semua kepala bidang, semua kabid, pejabat fungsional dan beberapa staf. Isu – isu strategis yang disepakati adalah sebagai berikut :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Bansari dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Bansari
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bansari
- 3) Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Bansari berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi Bupati
- 4) Selain permasalahan dan hambatan yang dihadapi, terdapat juga tantangan dan peluang yang harus diupayakan untuk meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Bansari
- 5) Catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan di tahun 2015.

Berdasarkan pertimbangan pembobotan tersebut, diperoleh hasil isu strategis sebagai berikut : Adapun isu strategis Kecamatan Bansari adalah sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya pelayanan public;

- 2) Belum optimalnya pengelolaan administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan, pengelolaan asset, dan pengelolaan kearsipan;
- 3) Menurunnya pengamalan budi pekerti, tata krama, nilai budaya, dan keteladanan;
- 4) Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan pendidikan;
- 5) Belum optimalnya pemerataan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;
- 6) Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi dan inovasi pertanian, pengembangan infrastruktur pertanian dan pengembangan pertanian yang berwawasan lingkungan;
- 7) Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 8) Belum optimalnya pemenuhan lingkungan hunian/permukiman yang bersih dan sehat;
- 9) Belum optimalnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan olahraga;
- 10) Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur daerah.

Bab 4

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS, DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi KECAMATAN BANSARI

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang. Pernyataan Visi Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018 adalah “MEWUJUDKAN KECAMATAN BANSARI MENUJU TEMANGGUNG SEBAGAI DAERAH AGRARIS BERWAWASAN LINGKUNGAN, MEMILIKI MASYARAKAT AGAMIS, BERBUDAYA, DAN SEJAHTERA DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH”

penjelasan dari pernyataan visi diatas adalah sebagai berikut :

Kecamatan Bansari yakni merupakan salah satu Kota Kecamatan di Kabupaten Temanggung yang jaraknya sekitar 18 Km dari arah Kabupaten letaknya berada di paling barat bagian tengah (lereng Gunung Sindoro) dan merupakan satu pintu. Penduduknya pada umumnya bermata pencaharian petani dan sebagai komoditas utamanya adalah tanaman tembakau.

Daerah agraris berwawasan lingkungan merupakan sebuah kondisi daerah yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi daerah yang secara ekonomi bertumpu pada sektor pertanian sebagai penggerak utama perekonomian daerah dan tumpuan kehidupan masyarakat. Sebagai sektor penggerak perekonomian daerah maka pengembangan sektor pertanian tetap dengan memperhatikan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Masyarakat Agamis merupakan sebuah kondisi masyarakat yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi dimana selain terpenuhinya kebutuhan jasmani masyarakat Kabupaten Temanggung, namun juga terpenuhinya kebutuhan rohani yang ditandai dengan sikap dan akhlak mulia yang sesuai dengan pemahaman, penghayatan, pengamalan ajaran agama, dan didukung dengan kebebasan menjalankan ajaran agama, serta toleransi antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga diharapkan seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Temanggung selalu tidak meninggalkan norma-norma agama.

Berbudaya merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi masyarakat yang memiliki budaya sehat, budaya peduli pendidikan, budaya kebersihan lingkungan khususnya tempat tinggal dan lingkungan perumahan, dan budaya peduli atas lingkungan sosial kemasyarakatan dan kebudayaan yang berkembang di lingkungan sekitarnya.

Sejahtera merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi masyarakat dimana seluruh individu masyarakat dapat mencukupi kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat karena terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, dan religius. Sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Pemerintahan yang bersih merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi pelaksanaan pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sesuai dengan arah pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga terwujud pemerintahan yang bersih di semua aspek pelaksanaan pemerintahan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Pernyataan Misi Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018 adalah sebagai berikut:

- Misi 1.** Mewujudkan pertanian modern yang berwawasan lingkungan
- Misi 2.** Mewujudkan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera;
- Misi 3.** Mewujudkan Infrastruktur Permukiman Perdesaan dan Perkotaan yang Layak dan Berwawasan Lingkungan;
- Misi 5.** Mewujudkan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan
- Misi 6.** Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut di atas, maka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Tahun 2014 - 2018 harus memiliki langkah, gerak, arah, semangat, dan dinamika yang sama.

Disamping hal tersebut, pelaksanaan pembangunan juga memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari: keterkaitan, keseimbangan, dan keadilan. Keterkaitan diartikan sebagai keterkaitan antar wilayah, antar sector, antar tingkat pemerintahan, dan antar pemangku kepentingan pembangunan. Keseimbangan diartikan sebagai keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial,

budaya, dan lingkungan. Keadilan diartikan sebagai keadilan antar kelompok masyarakat dan generasi.

Untuk menyatukan langkah, gerak, arah, semangat, dan dinamika para pemangku kepentingan pembangunan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Temanggung menetapkan sebuah tekad pembangunan yang dituangkan dalam sebuah Motto yaitu:

“BERSAMA MEMBANGUN TEMANGGUNG”

Sebuah tekad yang mengandung pemahaman bahwa pembangunan daerah merupakan tanggung-jawab bersama seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bansari

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dilaksanakan selama lima tahun kedepan.

Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Bansari sebagai berikut :

Misi 1. Mewujudkan pertanian modern yang berwawasan lingkungan

Tujuannya : Meningkatkan ketahanan pangan

Sasaran : Meningkatnya ketahanan pangan

Misi 2. Mewujudkan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera;

Tujuannya : a. Meningkatkan kualitas kehidupan politik, wawasan kebangsaan, keamanan dan ketertiban

b. Meningkatkan pengetahuan di bidang bencana alam

c. Meningkatkan kualitas iman dan taqwa

d. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat perdesaan

Sasaran : a. Meningkatnya kualitas kehidupan politik dan wawasan kebangsaan

b. Meningkatnya pengetahuan bencana alam

c. Meningkatnya kualitas iman dan taqwa

d. Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan

Misi 3. Mewujudkan Infrastruktur Permukiman Perdesaan dan Perkotaan yang Layak dan Berwawasan Lingkungan

Tujuannya : Mewujudkan infrastruktur pemukiman perdesaan dan perkotaan yang layak dan berwawasan lingkungan

Sasaran : Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan prinsip pembangunanberkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Misi 5. Mewujudkan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan masyarakat

Tujuannya : Meningkatkan penyehatan lingkungan

Sasaran : Meningkatnya perilaku hidup sehat

Misi 6. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik.

Tujuannya : a. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Birokrasi

b. Meningkatnya tertib administrasi penyelenggara pemerintahan daerah

c. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme

d. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya

e. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah

f. Meningkatkan kualitas data pembangunan dan data statistik daerah

g. Meningkatkan kualitas SDM pengurus PKK Desa

Sasaran : a. Meningkatnya kinerja penyelenggara pemerintahan daerah

b. Meningkatnya tertib administrasi penyelenggara pemerintahan daerah

c. Peningkatan tertib administrasi penyelenggara pemerintahan daerah

d. Meningkatnya kemampuan, profesionalisme, dan kesejahteraan SDM aparatur

e. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya

f. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah

g. Meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah

h. Meningkatnya kualitas SDM pengurus PKK Desa

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Bansari
Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Ketahanan pangan	Meningkatnya ketahanan pangan	Terciptanya ketahanan pangan	13	13	13	13	13
2	Meningkatkan kualitas kehidupan politik, wawasan kebangsaan, keamanan dan ketertiban	Meningkatnya kualitas kehidupan politik dan wawasan kebangsaan	Penurunan kasus SARA dan persentase peserta kegiatan politik masyarakat	13	13	13	13	13
3	Meningkatkan pengetahuan di bidang bencana alam	Meningkatnya pengetahuan bencana alam	Penanganan bencana alam	13	13	13	13	13
4	Meningkatkan kualitas iman dan taqwa	Meningkatnya kualitas iman dan taqwa	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tri kerukunan umat beragama dan cakupan fasilitasi pelaksanaan peribadatan	13	13	13	13	13
5	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya keberdayaan masyarakat	Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam	13	13	13	13	13

	perdesaan	perdesaan	teknologi tepat guna dan persentase menurunnya rumah tangga sasaran					
			Cakupan perencanaan pembangunan desa yang partisipatif dan persentase rumah tangga sasaran dalam Musrenbang	13	13	13	13	13
6	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	13	13	13	13	13
7	Meningkatkan penyehatan lingkungan	Meningkatnya perilaku hidup sehat	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa tingkat dasar	1	1	1	1	1
8	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Meningkatnya kinerja penyelenggara pemerintahan daerah	Persentase anggaran penata usahaan SKPD terhadap total belanja langsung SKPD dalam 1 (satu) tahun	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya tertib administrasi penyelenggara pemerintahan daerah	Persentase tersusunnya dokumen pelaporan daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
9	Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan tertib administrasi penyelenggara pemerintahan	Cakupan pembinaan administrasi desa	13	13	13	13	13

	daerah	daerah						
10	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme	Meningkatnya kemampuan, profesionalisme, kesejahteraan SDM aparatur	Persentase pengisian jabatan Kepala Desa yang kosong dan persentase pengisian jabatan perangkat desa yang kosong	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
11	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya	Cakupan penertiban Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), akte kelahiran, akte kematian, dan persentase penanganan pengaduan masyarakat	13	13	13	13	13
12	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah	Rasio dokumen perencanaan pembangunan daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
13	Meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah	Meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah	Besaran ketersediaan data statistik	13	13	13	13	13
14	Meningkatkan kualitas SDM pengurus PKK Desa	Meningkatnya kualitas SDM pengurus PKK Desa	Rasio pembinaan pengurus PKK Desa	13	13	13	13	13

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN KECAMATAN BANSARI

Strategi dan kebijakan dalam rencana strategi Kecamatan Bansari adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung tahun 2014 – 2018 yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018. Kebijakan adalah program dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih sehingga lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi dan kebijakan Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.3.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan Kecamatan Bansari
Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018

VISI : MEWUJUDKAN KECAMATAN BANSARI MENUJU TEMANGGUNG SEBAGAI DAERAH AGRARIS, BERWAWASAN LINGKUNGAN, MEMILIKI MASYARAKAT AGAMIS, BERBUDAYA, DAN SEJAHTERA DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH			
Misi 1. Mewujudkan pertanian modern yang berwawasan lingkungan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Ketahanan pangan	Meningkatnya ketahanan pangan	Peningkatan ketahanan pangan dari aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan	Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, difersifikasi konsumsi dan keamanan pangan, serta penanganan kerawanan pangan
Misi 2. Mewujudkan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang Agamis, Berbudaya, Dan Sejahtera;			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas kehidupan politik, wawasan kebangsaan, keamanan dan ketertiban	Meningkatnya kualitas kehidupan politik dan wawasan kebangsaan	Peningkatan ketertiban dan keamanan	Meningkatkan ketertiban dan keamanan melalui penegakan Peraturan daerah, penurunan angka kriminalitas, penanganan demonstrasi, dan patroli siaga serta ketersediaan tenaga linmas di masyarakat

Meningkatkan pengetahuan di bidang bencana alam	Meningkatnya pengetahuan bencana alam	Peningkatan pencegahan penanggulangan dan penanganan bencana	Meningkatkan upaya penanganan terhadap bencana alam
Meningkatkan kualitas iman dan taqwa	Meningkatnya kualitas iman dan taqwa	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana keagamaan	Meningkatkan pemberian bantuan sarana dan prasarana pendukung kegiatan keagamaan
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat perdesaan	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Peningkatan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat, dan pengurangan angka kemiskinan, serta peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat

Misi 3. Mewujudkan peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan dan Perkotaan Yang Layak dan Berwawasan Lingkungan

Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	Peningkatan kelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup khususnya penanganan dan pencegahan pencemaran air, udara dan tanah
---	---	--	---

Misi 5. Mewujudkan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan penyehatan lingkungan	Meningkatnya perilaku hidup sehat	Peningkatan lingkungan sehat	Meningkatkan lingkungan sehat melalui pengembangan akses yang berkelanjutan terhadap sanitasi dasar di perkotaan dan perdesaan, akses terhadap air bersih, dan penggunaan jamban keluarga

Misi 6. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Meningkatnya kinerja penyelenggara pemerintahan daerah	Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama pada sisi pemenuhan ketersediaan peraturan perundang undangan, penanganan temuan pemeriksaan, ketepatan pelaksanaan pembangunan, dan pelaporan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan
Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Peningkatan tertib administrasi penyelenggara pemerintahan daerah	Peningkatan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintah desa
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme	Meningkatnya kemampuan, profesionalisme, kesejahteraan SDM aparatur	Peningkatan kemampuan, profesionalisme, dan kesejahteraan SDM Aparatur	Meningkatkan kemampuan, profesionalisme, dan kesejahteraan SDM Aparatur melalui diklat pegawai, meningkatnya pendidikan formal pegawai, pemenuhan hak dan penghargaan pegawai, dan pengisian jabatan struktural yang kosong
Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya
Meningkatkan kualitas	Meningkatnya kualitas	Peningkatan kualitas	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian,

perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah	perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah	perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah	evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah yang terpadu dan partisipatif
Meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah	Meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah	Peningkatan kualitas data pembangunan dan data statistik daerah	Meningkatkan kualitas data pembangunan dan data statistik daerah yang akan digunakan dalam perencanaan pembangunan setiap tahunnya

Bab 5

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama lima tahun kedepan, yaitu tahun 2014 – 2018 mempunyai rencana program kegiatan sebagai berikut :

- 1) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Kegiatan : a. Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah;
b. Pembinaan Hansip/Linmas desa
- 2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
Kegiatan : - Pendampingan raskin
- 3) Program Pengembangan nilai keagamaan
Kegiatan : a. Pembinaan kerukunan antar umat beragama dan SKB 3 Menteri
b. Fasilitasi kegiatan keagamaan
- 4) Program pencegahan dan kesiap-siagaan
Kegiatan : - Sosialisasi penanganan bencana alam
- 5) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa
Kegiatan : a. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
b. Fasilitasi kegiatan pendampingan desa binaan
c. Fasilitasi PWK
d. Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MD)
- 6) Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan
Kegiatan : a. Fasilitasi dan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan dan tingkat kecamatan
b. Fasilitasi Penyusunan RKP Desa

- 7) Program Pengendalian dan Perusakan Lingkungan Hidup
Kegiatan : - Fasilitasi gerakan budaya sehat dan kebersihan lingkungan.
- 8) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : - Pembinaan UKS/LSS
- 9) Program Program Penataan Administrasi Kependudukan
Kegiatan : - Fasilitasi administrasi kependudukan
- 10) Program Perencanaan pembangunan daerah
Kegiatan : - Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD
- 11) Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah
Kegiatan : a. Fasilitasi penyusunan dan pemberdayaan profil desa dan kelurahan.
b. Penyusunan Profil Kecamatan
- 12) Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Kegiatan : - Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
- 13) Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Kegiatan : a. Fasilitasi dan verifikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
b. Monitoring pelaksanaan pembangunan tingkat kecamatan
- 14) Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
Kegiatan : a. Fasilitasi dan evaluasi Perdes tentang APBDes
b. Fasilitasi kegiatan Alokasi Dana Desa
- 15) Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa
Kegiatan : a. Fasilitasi kegiatan pengisian Kades dan Perdes
b. Rapat koordinasi Kades dan Perangkat Desa
c. Pelatihan aparatur pemerintahan desa/kelurahan
d. Fasilitasi pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pelantikan BPD antar waktu
- 16) Program Pelayanan administrasi perkantoran
Kegiatan : a. Penyediaan jasa surat menyurat
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
c. Penyediaan jasa kebersihan kantor
d. Penyediaan alat tulis kantor
e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor
- g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- h. Penyediaan makanan dan minuman
- i. Rapat Koordinasi dan Kunsultasi dalam daerah
- j. Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- k. Jasa pelayanan perkantoran

17) Program Peningkatan sarana prasarana aparatur

- Kegiatan : a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- b. Pengadaan peralatan gedung kantor
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
 - d. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
 - e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - f. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 - g. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 - h. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor
 - i. Pengadaan perlengkapan rumah dinas

18) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan

- Kegiatan : - Fasilitasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga

Tabel 5.1

Rencana program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Kecamatan Bansari Kabupaten temanggung

MISI	Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Daerah (Indikator Program) dan Indikator Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2012	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan													
						2013 (Sesuai APBD 2013)			2014 (sesuai DPA 2014)		2015		2016		2017		2018		
						Tar get	prediksi capaian	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			BELANJA TIDAK LANGSUNG																
			Belanja hibah Program Pagu Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Program PWK di Desa/Kelurahan	500.000	4 desa	100%	404.600.000	2 Desa	422.000.000	11 Desa	479.000.000	3 desa	508.400.000	3 desa	550.600.000	4 desa	592.800.000	
			BELANJA LANGSUNG																
MISI I			KETAHANAN PANGAN																
Mewujudkan pertanian modern yang berwawasan lingkungan	Meningkatkan ketahanan pangan	Meningkatnya ketahanan pangan	1 Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan	Terciptanya ketahanan pangan															
			a Pendampingan program raskin	Terfasilitasinya pendampingan raskin	-	0	0	-	13 desa	3.000.000	13 desa	2.600.000	13 desa	2.860.000	13 desa	3.120.000	13 desa	3.380.000	

MISI 2			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI															
Mewujudkan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Politik, Wawasan Kebangsaan, Keamanan, dan Ketertiban	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Politik dan Wawasan Kebangsaan	2 Program pemeliharaan kantrantibman dan pencegahan tindak criminal	Penurunan kasus SARA dan Peningkatan Partisipasi Pemilih														
			a Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dan berkurangnya tindak kriminalitas	18.000.000	13 desa	100%	24.720.000	13 desa	24.960.000	13 desa	27.456.000	13 desa	29.952.000	13 desa	32.448.000	13 desa	34.944.000
			b Pembinaan Hansip/Linmas Desa/Kelurahan	Terbinanya anggota Hansip/Linmas di Desa/Kelurahan	1.985.000	13 desa	100%	3.000.000	13 desa	3.500.000	13 desa	4.875.000	13 desa	6.240.000	13 desa	6.760.000	13 desa	7.280.000
			c Pemantauan Kegiatan Pemilukada di Tingkat kecamatan	Meningkatnya kondusifitas wilayah dan meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilukada	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	100 %	26.000.000
			3 Program pencegahan dini dan penanggulangan bencana alan	Penanganan bencana alam														

	Meningkatkan pengetahuan di bidang bencana alam	Meningkatnya pengetahuan bencana alam	a	Sosialisasi Bencana alam	Terlaksananya kegiatan sosialisasi bencana alam	-	0	0	-	13 desa	2.000.000	13 desa	2.600.000	13 desa	4.000.000	13 desa	4.500.000	13 desa	5.000.000
			KEBUDAYAAN																
	Meningkatkan Kualitas Iman dan Taqwa	Meningkatnya Kualitas Iman dan Taqwa	4	Program Pengembangan Nilai Keagamaan	Cakupan Fasilitasi Pelaksanaan Tri Kerukunan Umat Beragama dan Cakupan Fasilitasi Pelaksanaan Peribadahan														
			a	Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama dan SKB 3 Menteri	Terciptanya kerukunan antar umat beragama	2.000.000	13 desa	100%	3.000.000	13 desa	3.000.000	13 desa	2.600.000	13 desa	3.500.000	13 desa	4.000.000	13 desa	4.500.000
			b	Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Meningkatnya kualitas kegiatan keagamaan	-	0	0	-	0	-	13 desa	1.300.000	13 desa	3.500.000	13 desa	3.750.000	13 desa	4.000.000
			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																

	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan	5 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Cakupan Pemberdayaan masyarakat dalam Teknologi Tepat Guna, Persentase Menurunnya Rumah Tangga Sasaran														
			a Pemberdayaan Lembaga Organisasi Masyarakat Perdesaan dan	Meningkatnya kuantitas/kualitas kelembagaan Desa/Kelurahan	-	13 desa	100%	3.000.000	13 desa	5.000.000	13 desa	6.500.000	13 desa	2.860.000	13 desa	3.120.000	13 desa	3.380.000
			B Fasilitasi Kegiatan Pendampingan Desa Binaan	Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan	1.500.000	1 tahun	100%	1.500.000	1 tahun	3.000.000	1 tahun	4.000.000	1 tahun	4.400.000	1 tahun	4.800.000	1 tahun	5.200.000
			C Fasilitasi Wilayah Kecamatan Pagu	Terlaksananya kegiatan Program PWK dalam rangka percepatan pembangunan	4.395.000	1 tahun	100%	5.000.000	1 tahun	5.500.000	1 tahun	6.000.000	1 tahun	5.000.000	1 tahun	5.000.000	1 tahun	5.000.000
			D Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan/Perkotaan (PNPM-MP)	Terlaksananya kegiatan PNPM-MP Perdesaan/Perkotaan dalam rangka percepatan pembangunan	3.900.000	13 desa	100%	3.900.000	13 desa	4.500.000	13 desa	5.200.000	13 desa	5.720.000	13 desa	6.240.000	13 desa	6.760.000

			6 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa/Kelurahan	Cakupan Perencanaan Pembangunan Desa yang Partisipatif dan Persentase Partisipasi Rumah Tangga Sasaran dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa														
			a Fasilitasi dan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan dan tingkat kecamatan	Telaksananya Musrenbang di tingkat Desa/Kelurahan dan Tingkat Kecamatan	3.192.500	13 desa	100%	5.000.000	13 desa	6.000.000	13 desa	6.500.000	13 desa	6.435.000	13 desa	7.020	13 desa	7.605.000
			b Fasilitasi Penyusunan RPJMDes	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah desa yang partisipatif	-	0	0	-	13 desa	2.500.000	-	0	-	0	-	0	-	
			c Fasilitasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	Telaksananya pembinaan kepengurusan PKK Desa							13 desa	4.550.000	13 desa	6.500.000	13 desa	7.000.000	13 desa	7.500.000
			d Fasilitasi Penyusunan RKP Desa	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah desa yang partisipatif	-	0	0	-			13 desa	2.600.000	13 desa	3.000.000	13 desa	3.500.000	13 desa	4.000.000

MISI 3		LINGKUNGAN HIDUP																	
Mewujudkan Infrastruktur Permukiman Perdesaan dan Perkotaan yang Layak dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	7	Program Pengendalian dan Perusakan Lingkungan Hidup															
			a	Fasilitasi Gerakan Budaya Sehat dan Kebersihan Lingkungan	Terciptanya kebersihan lingkungan Desa/Kelurahan	-			-		-	13 desa	2.600.000	13 desa	3.000.000	13 desa	3.500.000	13 desa	4.000.000
MISI 5		KESEHATAN																	
Mewujudkan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan Penyehatan Lingkungan	Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat	8	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa Tingkat Dasar														
			a	Pembinaan UKS/LSS	Terciptanya perilaku hidup bersih dan sehat serta lingkungan sehat dilingkungan Sekolah Dasar	997.500	1 tahun	100%	1.200.000	1 tahun	2.500.000	1 tahun	2.500.000	1 tahun	3.000.000	1 tahun	3.500.000	1 tahun	4.000.000
MISI 6				OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN															

Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	9	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Anggaran Penatausahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) Tahun														
			a	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya layanan surat menyurat perkantoran	-	0	0	-	0	-	1 tahun	5.000.000	1 tahun	5.000.000	1 tahun	6.000.000	1 tahun	6.000.000
			b	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik	6.453.641	1 tahun	100%	8.000.000	1 tahun	15.000.000	1 tahun	15.000.000	1 tahun	16.000.000	1 tahun	17.500.000	1 tahun	20.000.000
			c	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa, alat, dan bahan kebersihan	4.500.000	1 tahun	100%	6.300.000	1 tahun	7.500.000	1 tahun	9.000.000	1 tahun	10.000.000	1 tahun	11.000.000	1 tahun	12.000.000
			d	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	5.617.000	1 tahun	100%	7.000.000	1 tahun	7.500.000	1 tahun	10.000.000	1 tahun	10.000.000	1 tahun	11.000.000	1 tahun	12.000.000
			e	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan	2.496.300	1 tahun	100%	3.500.000	1 tahun	4.000.000	1 tahun	5.000.000	1 tahun	7.000.000	1 tahun	8.000.000	1 tahun	9.000.000
			f	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	2.465.000	1 tahun	100%	2.500.000	1 tahun	3.000.000	1 tahun	5.000.000	1 tahun	6.000.000	1 tahun	7.000.000	1 tahun	8.000.000
			g	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	900.000	1 tahun	100%	900.000	1 tahun	999.000	1 tahun	1.200.000	1 tahun	2.000.000	1 tahun	2.500.000	1 tahun	3.000.000
			h	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu,	10.914.000	1 tahun	100%	12.000.000	1 tahun	15.000.000	1 tahun	18.000.000	1 tahun	18.000.000	1 tahun	20.000.000	1 tahun	20.000.000

				Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk persiapan hari-hari besar Nasional dan agama						1 tahun	2.500.000	1 tahun	3.000.000	1 tahun	3.500.000	1 tahun	4.000.000		
			i	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas tetap	15.525.000	1 tahun	100%	16.200.000	1 tahun	16.200.000	1 tahun	20.000.000	1 tahun	20.000.000	1 tahun	22.000.000	1 tahun	22.000.000
			i	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas tetap							1 tahun	10.000.000	1 tahun	12.000.000	1 tahun	14.000.000	1 tahun	16.000.000
			j	Jasa Pelayanan perkantoran	Tersedianya honorarium/upah tenaga kerja dan uang lembur	-	0	0	-	0%	-	1 tahun	3.000.000	1 tahun	4.000.000	1 tahun	5.000.000	1 tahun	6.000.000
			10	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Anggaran Penata usahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) Tahun														
			a	Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	-	0	0	-			6 set	20000000 (Mebelair)	1 tahun	50.000.000	1 tahun	50.000.000	1 tahun	50.000.000
													5000000 (penangkal petir)						
			b	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	9.667.000	1 tahun	100%	16.000.000	1 tahun	15.000.000	1 Laptop	7.500.000	1 tahun	15.000.000	1 tahun	20.000.000	1 tahun	20.000.000
			c	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Rumah Dinas	6.000.000	1 tahun	100%	6.000.000	1 tahun	6.500.000	1 tahun	7.500.000	1 tahun	10.000.000	1 tahun	10.000.000	1 tahun	15.000.000
			d	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/operasional	10.443.000	1 tahun	100%	20.500.000	1 tahun	20.000.000	1 tahun	20.000.000	1 tahun	25.000.000	1 tahun	28.000.000	1 tahun	30.000.000

			e	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	-	1 tahun	100%	-	1 tahun	-	1 tahun	2.500.000	1 tahun	3.000.000	1 tahun	4.000.000	1 tahun	5.000.000
			f.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	-	1 tahun	100%	-	1 tahun	-	1 tahun	2.500.000	1 tahun	4.000.000	1 tahun	5.000.000	1 tahun	6.000.000
			g	Pemeliharaan rutin/berkala rumah Dinas Camat	Terpeliharanya rumah dinas	2.500.000	1 tahun	100%	2.500.000	1 tahun	3.000.000	1 tahun	4.000.000	1 tahun	5.000.000	1 tahun	6.000.000	1 tahun	7.000.000
			h	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	50.000.000	1 tahun	100%	22.500.000	1 tahun	105.000.000	1 bidang	50000000 (Mushola)	1 tahun	100.000.000	0%	-	1 tahun	100.000.000
			i	Pengadaan perlengkapan rumah dinas	Tersedianya sarana dan prasarana rumah dinas Camat							1 paket	20.000.000	1 tahun	25.000.000	0%	25.000.000	1 tahun	30.000.000
			11	Program peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Anggaran Penata usahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) Tahun														
			a	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Terciptanya disiplin aparatur	3.600.000	0	0	-	29 org	5.800.000	29 org	-	29 org	7.250.000	0	-	29 org	9.000.000
			12	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Rasio Realisasi Pendapatan Daerah Terhadap Potensi Pendapatan Daerah dan Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah														
			a	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Terpenuhinya target pendapatan daerah	5.500.000	13 desa	100%	18.564.000	13 desa	25.000.000	13 desa	30.000.000	13 desa	30.000.000	13 desa	32.000.000	13 desa	32.000.000

			b	Fasilitas Pemakaman Umum	Terpenuhinya target pendapatan daerah	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0%	-	
		Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	13	Program Pengawasan Sistem Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Tersusunnya dokumen pelaporan daerah														
			a	Fasilitas dan verifikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu di Kecamatan	14.900.000	12 bulan	100%	15.000.000	12 bulan	15.000.000	12 bulan	5.000.000	12 bulan	5.500.000	12 bulan	6.000.000	12 bulan	6.500.000
			b	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan tingkat Kecamatan	Terselenggaranya pemantauan kegiatan pembangunan yang berlokasi di kecamatan	-	0	0	-	0	-	12 bulan	2.500.000	12 bulan	3.600.000	12 bulan	3.900.000	12 bulan	4.200.000
	Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	14	Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa	Cakupan Pembinaan Administrasi Desa														
			a	Fasilitas dan Evaluasi Peraturan Desa tentang APBDes	Terlaksananya pembinaan dan tertib administrasi keuangan desa	1.300.000	13 desa	100%	1.300.000	13 desa	2.600.000	13 desa	3.250.000	13 desa	3.120.000	13 desa	3.380.000	13 desa	3.640.000
			b	Pembinaan administrasi desa	Terlaksananya pembinaan dan tertib administrasi desa	-			-	13 desa	4.000.000	13 desa	6.000.000	13 desa	6.000.000	13 desa	7.500.000	13 desa	7.500.000
			c	Fasilitas Alokasi Dana Desa (ADD)	Terlaksananya pembinaan dan tertib administrasi keuangan desa	3.072.000	13 desa	100%	5.200.000	13 desa	6.500.000	13 desa	6.500.000	13 desa	7.020.000	13 desa	7.605.000	13 desa	8.190.000

	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme	Meningkatnya Kemampuan, Profesionalisme, dan Kesejahteraan SDM Aparatur	15 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Persentase Pengisian Jabatan Kepala Desa yang Kosong dan Persentase Pengisian Jabatan Kepala Desa yang Kosong														
			a Fasilitasi Pengisian Kades dan Perangkat Desa	Terisnya kekosongan Kades dan Perangkat Desa	1.000.000	13 desa	100%	12.490.000	13 desa	4.500.000	13 desa	5.000.000	13 desa	6.000.000	13 desa	8.000.000	13 desa	10.000.000
			b Rapat Koordinasi Kades dan Perangkat Desa	Terciptanya koordinasi antar Kades dan Perangkat Desa	4.680.000	13 desa	100%	4.700.000	13 desa	6.000.000	13 desa	5.200.000	13 desa	6.240.000	13 desa	6.760.000	13 desa	7.280.000
			c Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan	Meningkatnya SDM Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan	-			-			13 desa	3.900.000	13 desa	4.680.000	13 desa	5.070.000	13 desa	5.460.000
			d Fasilitasi Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pelantikan BPD antar Waktu	Terisnya kekosongan Anggota BPD	-			-		-	13 desa	2.250.000	13 desa	2.500.000	13 desa	2.750.000	13 desa	3.000.000
			KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL															
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Lainnya	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Lainnya	16 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan persentase penanganan pengaduan masyarakat														
			a Fasilitasi Administrasi Kependudukan	Terwujudnya tertib administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	10.212.600			-	13 desa	4.500.000	13 desa	2.600.000	13 desa	5.500.000	13 desa	6.000.000	13 desa	6.500.000
			PERENCANAAN															

	Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pengkajian Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pengkajian Pembangunan Daerah	17 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rasio Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah														
			a Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tepat waktu	-	0	0	-	12 bulan	-	12 bulan	750.000	12 bulan	2.250.000	12 bulan	2.500.000	12 bulan	2.750.000
			STATISTIK															
	Meningkatkan Kualitas Data Pembangunan dan Data Statistik Daerah	Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan dan Data Statistik Daerah	18 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Besaran ketersediaan data statistic														
			a Fasilitasi Penyusunan dan pemberdayaan profil desa/kelurahan	Tersusunnya Profil Desa/Kelurahan	-	13 desa	100%	3.000.000	13 desa	4.000.000	13 desa	3.900.000	13 desa	3.000.000	13 desa	3.500.000	13 desa	4.000.000
			b Penyusunan Profil Kecamatan/ Penyusunan data statistic	Tersusunnya Profil Kecamatan	3.000.000			-			1 tahun	2.600.000	1 tahun	3.575.000	1 tahun	3.900.000	1 tahun	4.225.000

Bab 6

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN BANSARI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2013 – 2018

Indikator kinerja Kecamatan Bansari kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018 yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung pada tahun 2014 – 2018 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018 adalah sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Tabel 6.1

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN BANSARI

NO	INDIKATOR SASARAN	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terciptanya ketahanan pangan	13	13	13	113	13	13	13
2	Penurunan kasus SARA dan peningkatan partisipasi pemilih	13	13	13	13	13	13	13
3	Penanganan bencana alam	13	13	13	13	13	13	13
4	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tri kerukunan umat beragama dan cakupan fasilitasi pelaksanaan peribadatan	13	13	13	13	13	13	13

5	Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam teknologitepat guna dan persentase menurunnya rumah tangga sasaran	13	13	13	13	13	13	13
6	Cakupan perencanaan pembangunan desa yang partisipatif dan persentase partisipasi rumah tangga sasaran dalam Musrenbang	13	13	13	13	13	13	13
7	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	13	13	13	13	13	13	13
8	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa tingkat dasar	1	1	1	1	1	1	1
9	Persentase anggaran penatausahaan SKPD terhadap total belanja langsung SKPD dalam 1 (satu) tahun	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
10	Rasio realisasi pendapatan daerah terhadap potensi pendapatan daerah	13	13	13	13	13	13	13

11	Persentase dokumen perencanaan pembangunan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
12	Cakupan pembinaan administrasi desa	13	13	13	13	13	13	13
13	Persentase pengisian jabatan kepala desa yang kosong dan persentase pengisian perangkat desa yang kosong	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
14	Cakupan penertiban Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte kelahiran, Akte kematian, dan persentase penanganan pengaduan masyarakat	13	13	13	13	13	13	13
15	Rasio dokumen perencanaan pembangunan daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
16	Besaran ketersediaan data statistik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
17	Cakupan pengurus PKK Desa yang dibina	13	13	13	13	13	13	13

Bab 7 PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Tahun 2014 - 2018 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 - 2018, melalui pelaksanaan rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan. Mendasarkan pada ketentuan peraturan perundangan terkait, Renstra disusun dengan mempedomani dokumen perencanaan, baik nasional maupun daerah, dan penyusunannya dilakukan melalui berbagai rangkaian kegiatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan.

Selanjutnya Renstra dijadikan pedoman bagi Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung dalam rangka mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan jangka menengah tahun 2014 - 2018 melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan. Selain itu Renstra juga menjadi alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bansari.

Keberhasilan mewujudkan cita-cita yang tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Tahun 2014 - 2018 memerlukan dukungan seluruh para pemangku kepentingan yang terkait. Oleh karena itu dukungan, kesungguhan serta rasa tanggung jawab perlu dimiliki oleh seluruh pemangku kepentingan.

LAMPIRAN I

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif KECAMATAN BANSARI (2013 – 2018)

Kabupaten Temanggung

MISI	Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Daerah (Indikator Program) dan Indikator Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2012	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan													
						2013 (Sesuai APBD 2013)			2014 (sesuai DPA 2014)		2015		2016		2017		2018		
						Tar get	prediksi capaian	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			BELANJA TIDAK LANGSUNG																
			Belanja hibah Program Pagu Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Program PWK di Desa/Kelurahan	500.000	4 desa	100%	404.600.000	2 Desa	422.000.000	11 Desa	479.000.000	3 desa	508.400.000	3 desa	550.600.000	4 desa	592.800.000	
			BELANJA LANGSUNG																
MISI I			KETAHANAN PANGAN																
Mewujudkan pertanian modern yang berwawasan lingkungan	Meningkatkan ketahanan pangan	Meningkatnya ketahanan pangan	1 Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan	Terciptanya ketahanan pangan															
			a Pendampingan program raskin	Terfasilitasinya pendampingan raskin	-	0	0	-	13 desa	3.000.000	13 desa	2.600.000	13 desa	2.860.000	13 desa	3.120.000	13 desa	3.380.000	

MISI 2			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI															
Mewujudkan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Politik, Wawasan Kebangsaan, Keamanan, dan Ketertiban	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Politik dan Wawasan Kebangsaan	2 Program pemeliharaan kantrantibman dan pencegahan tindak criminal	Penurunan kasus SARA dan Peningkatan Partisipasi Pemilih														
			a Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dan berkurangnya tindak kriminalitas	18.000.000	13 desa	100%	24.720.000	13 desa	24.960.000	13 desa	27.456.000	13 desa	29.952.000	13 desa	32.448.000	13 desa	34.944.000
			b Pembinaan Hansip/Linmas Desa/Kelurahan	Terbinanya anggota Hansip/Linmas di Desa/Kelurahan	1.985.000	13 desa	100%	3.000.000	13 desa	3.500.000	13 desa	4.875.000	13 desa	6.240.000	13 desa	6.760.000	13 desa	7.280.000
			c Pemantauan Kegiatan Pemilukada di Tingkat kecamatan	Meningkatnya kondusifitas wilayah dan meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilukada	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	100 %	26.000.000
			3 Program pencegahan dini dan penanggulangan bencana alan	Penanganan bencana alam														

	Meningkatkan pengetahuan di bidang bencana alam	Meningkatnya pengetahuan bencana alam	a Sosialisasi Bencana alam	Terlaksananya kegiatan sosialisasi bencana alam	-	0	0	-	13 desa	2.000.000	13 desa	2.600.000	13 desa	4.000.000	13 desa	4.500.000	13 desa	5.000.000
			KEBUDAYAAN															
	Meningkatkan Kualitas Iman dan Taqwa	Meningkatnya Kualitas Iman dan Taqwa	4 Program Pengembangan Nilai Keagamaan	Cakupan Fasilitas Pelaksanaan Tri Kerukunan Umat Beragama dan Cakupan Fasilitas Pelaksanaan Peribadahan														
			a Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama dan SKB 3 Menteri	Terciptanya kerukunan antar umat beragama	2.000.000	13 desa	100%	3.000.000	13 desa	3.000.000	13 desa	2.600.000	13 desa	3.500.000	13 desa	4.000.000	13 desa	4.500.000
			b Fasilitas Kegiatan Keagamaan	Meningkatnya kualitas kegiatan keagamaan	-	0	0	-	0	-	13 desa	1.300.000	13 desa	3.500.000	13 desa	3.750.000	13 desa	4.000.000
			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															

	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan	5 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Cakupan Pemberdayaan masyarakat dalam Teknologi Tepat Guna, Persentase Menurunnya Rumah Tangga Sasaran														
			a Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Meningkatnya kuantitas/kualitas kelembagaan Desa/Kelurahan	-	13 desa	100%	3.000.000	13 desa	5.000.000	13 desa	6.500.000	13 desa	2.860.000	13 desa	3.120.000	13 desa	3.380.000
			b Fasilitasi Kegiatan Pendampingan Desa Binaan	Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan	1.500.000	1 tahun	100%	1.500.000	1 tahun	3.000.000	1 tahun	4.000.000	1 tahun	4.400.000	1 tahun	4.800.000	1 tahun	5.200.000
			c Fasilitasi Pagu Wilayah Kecamatan	Terlaksananya kegiatan Program PWK dalam rangka percepatan pembangunan	4.395.000	1 tahun	100%	5.000.000	1 tahun	5.500.000	1 tahun	6.000.000	1 tahun	5.000.000	1 tahun	5.000.000	1 tahun	5.000.000
			d Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan/Perkotaan (PNPM-MP)	Terlaksananya kegiatan PNPM-MP Perdesaan/Perkotaan dalam rangka percepatan pembangunan	3.900.000	13 desa	100%	3.900.000	13 desa	4.500.000	13 desa	5.200.000	13 desa	5.720.000	13 desa	6.240.000	13 desa	6.760.000

			6 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa/Kelurahan	Cakupan Perencanaan Pembangunan Desa yang Partisipatif dan Persentase Partisipasi Rumah Tangga Sasaran dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa														
			a Fasilitasi dan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan dan tingkat kecamatan	Telaksananya Musrenbang di tingkat Desa/Kelurahan dan Tingkat Kecamatan	3.192.500	13 desa	100%	5.000.000	13 desa	6.000.000	13 desa	6.500.000	13 desa	6.435.000	13 desa	7.020	13 desa	7.605.000
			b Fasilitasi Penyusunan RPJMDes	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah desa yang partisipatif	-	0	0	-	13 desa	2.500.000	-	0	-	0	-	0	-	
			c Fasilitasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	Telaksananya pembinaan kepengurusan PKK Desa							13 desa	4.550.000	13 desa	6.500.000	13 desa	7.000.000	13 desa	7.500.000

			d	Fasilitasi Penyusunan RKP Desa	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah desa yang partisipatif	-	0	0	-			13 desa	2.600.000	13 desa	3.000.000	13 desa	3.500.000	13 desa	4.000.000
MISI 3			LINGKUNGAN HIDUP																
Mewujudkan Infrastruktur Permukiman Perdesaan dan Perkotaan yang Layak dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	7	Program Pengendalian dan Perusakan Lingkungan Hidup															
			a	Fasilitasi Gerakan Budaya Sehat dan Kebersihan Lingkungan	Terciptanya kebersihan lingkungan Desa/Kelurahan	-			-			13 desa	2.600.000	13 desa	3.000.000	13 desa	3.500.000	13 desa	4.000.000
MISI 5			KESEHATAN																
Mewujudkan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan Penyehatan Lingkungan	Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat	8	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa Tingkat Dasar														
			a	Pembinaan UKS/LSS	Terciptanya perilaku hidup bersih dan sehat serta lingkungan sehat di lingkungan Sekolah Dasar	997.500	1 tahun	100%	1.200.000	1 tahun	2.500.000	1 tahun	2.500.000	1 tahun	3.000.000	1 tahun	3.500.000	1 tahun	4.000.000

MISI 6			OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN																
Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	9	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Anggaran Penatausahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) Tahun														
			a	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya layanan surat menyurat perkantoran	-	0	0	-	0	-	1 tahun	5.000.000	1 tahun	5.000.000	1 tahun	6.000.000	1 tahun	6.000.000
			b	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik	6.453.641	1 tahun	100%	8.000.000	1 tahun	15.000.000	1 tahun	15.000.000	1 tahun	16.000.000	1 tahun	17.500.000	1 tahun	20.000.000
			c	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa, alat, dan bahan kebersihan	4.500.000	1 tahun	100%	6.300.000	1 tahun	7.500.000	1 tahun	9.000.000	1 tahun	10.000.000	1 tahun	11.000.000	1 tahun	12.000.000
			d	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	5.617.000	1 tahun	100%	7.000.000	1 tahun	7.500.000	1 tahun	10.000.000	1 tahun	10.000.000	1 tahun	11.000.000	1 tahun	12.000.000
			e	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan	2.496.300	1 tahun	100%	3.500.000	1 tahun	4.000.000	1 tahun	5.000.000	1 tahun	7.000.000	1 tahun	8.000.000	1 tahun	9.000.000

			f	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	2.465.000	1 tahun	100%	2.500.000	1 tahun	3.000.000	1 tahun	5.000.000	1 tahun	6.000.000	1 tahun	7.000.000	1 tahun	8.000.000
			g	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	900.000	1 tahun	100%	900.000	1 tahun	999.000	1 tahun	1.200.000	1 tahun	2.000.000	1 tahun	2.500.000	1 tahun	3.000.000
			h	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu,	10.914.000	1 tahun	100%	12.000.000	1 tahun	15.000.000	1 tahun	18.000.000	1 tahun	18.000.000	1 tahun	20.000.000	1 tahun	20.000.000
					Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk persiapan hari-hari besar Nasional dan agama							1 tahun	2.500.000	1 tahun	3.000.000	1 tahun	3.500.000	1 tahun	4.000.000
			i	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas tetap	15.525.000	1 tahun	100%	16.200.000	1 tahun	16.200.000	1 tahun	20.000.000	1 tahun	20.000.000	1 tahun	22.000.000	1 tahun	22.000.000
			i	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas tetap							1 tahun	10.000.000	1 tahun	12.000.000	1 tahun	14.000.000	1 tahun	16.000.000
			j	Jasa Pelayanan perkantoran	Tersedianya honorarium/upah tenaga kerja dan uang lembur	-	0	0	-	0%	-	1 tahun	3.000.000	1 tahun	4.000.000	1 tahun	5.000.000	1 tahun	6.000.000

			10	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Anggaran Penata usahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) Tahun														
			a	Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	-	0	0	-		6 set	20000000 (Mebelair)	1 tahun	50.000.000	1 tahun	50.000.000	1 tahun	50.000.000	
											5000000 (penangkal petir)								
			b	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	9.667.000	1 tahun	100%	16.000.000	1 tahun	15.000.000	1 Laptop	7.500.000	1 tahun	15.000.000	1 tahun	20.000.000	1 tahun	20.000.000
			c	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Rumah Dinas	6.000.000	1 tahun	100%	6.000.000	1 tahun	6.500.000	1 tahun	7.500.000	1 tahun	10.000.000	1 tahun	10.000.000	1 tahun	15.000.000
			d	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/operasional	10.443.000	1 tahun	100%	20.500.000	1 tahun	20.000.000	1 tahun	20.000.000	1 tahun	25.000.000	1 tahun	28.000.000	1 tahun	30.000.000
			e	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	-	1 tahun	100%	-	1 tahun	-	1 tahun	2.500.000	1 tahun	3.000.000	1 tahun	4.000.000	1 tahun	5.000.000
			f.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	-	1 tahun	100%	-	1 tahun	-	1 tahun	2.500.000	1 tahun	4.000.000	1 tahun	5.000.000	1 tahun	6.000.000

			g	Pemeliharaan rutin/berkala rumah Dinas Camat	Terpeliharanya rumah dinas	2.500.000	1 tahun	100%	2.500.000	1 tahun	3.000.000	1 tahun	4.000.000	1 tahun	5.000.000	1 tahun	6.000.000	1 tahun	7.000.000
			h	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	50.000.000	1 tahun	100%	22.500.000	1 tahun	105.000.000	1 bidang	50000000 (Mushola)	1 tahun	100.000.000	0%	-	1 tahun	100.000.000
			l	Pengadaan perlengkapan rumah dinas	Tersedianya sarana dan prasarana rumah dinas Camat							1 paket	20.000.000	1 tahun	25.000.000	0%	25.000.000	1 tahun	30.000.000
			11	Program peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Anggaran Penata usahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) Tahun														
			a	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Terciptanya disiplin aparatur	3.600.000	0	0	-	29 org	5.800.000	29 org	-	29 org	7.250.000	0	-	29 org	9.000.000

			12	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Rasio Realisasi Pendapatan Daerah Terhadap Potensi Pendapatan Daerah dan Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah														
			a	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Terpenuhinya target pendapatan daerah	5.500.000	13 desa	100%	18.564.000	13 desa	25.000.000	13 desa	30.000.000	13 desa	30.000.000	13 desa	32.000.000	13 desa	32.000.000
			b	Fasilitasi Pemakaman Umum	Terpenuhinya target pendapatan daerah	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-
		Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	13	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Tersusunnya dokumen pelaporan daerah														

			a	Fasilitasi dan verifikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu di Kecamatan	14.900.000	12 bulan	100%	15.000.000	12 bulan	15.000.000	12 bulan	5.000.000	12 bulan	5.500.000	12 bulan	6.000.000	12 bulan	6.500.000
			b	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan tingkat Kecamatan	Terseleenggaranya pemantauan kegiatan pembangunan yang berlokasi di kecamatan	-	0	0	-	0	-	12 bulan	2.500.000	12 bulan	3.600.000	12 bulan	3.900.000	12 bulan	4.200.000
	Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	14	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Cakupan Pembinaan Administrasi Desa														
			a	Fasilitasi dan Evaluasi Peraturan Desa tentang APBDes	Terlaksananya pembinaan dan tertib administrasi keuangan desa	1.300.000	13 desa	100%	1.300.000	13 desa	2.600.000	13 desa	3.250.000	13 desa	3.120.000	13 desa	3.380.000	13 desa	3.640.000
			b	Pembinaan administrasi desa	Terlaksananya pembinaan dan tertib administrasi desa	-			-	13 desa	4.000.000	13 desa	6.000.000	13 desa	6.000.000	13 desa	7.500.000	13 desa	7.500.000
			c	Fasilitasi Alokasi Dana Desa (ADD)	Terlaksananya pembinaan dan tertib administrasi keuangan desa	3.072.000	13 desa	100%	5.200.000	13 desa	6.500.000	13 desa	6.500.000	13 desa	7.020.000	13 desa	7.605.000	13 desa	8.190.000

	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme	Meningkatnya Kemampuan, Profesionalisme, dan Kesejahteraan SDM Aparatur	15 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Persentase Pengisian Jabatan Kepala Desa yang Kosong dan Persentase Pengisian Jabatan Kepala Desa yang Kosong														
			a Fasilitasi Pengisian Kades dan Perangkat Desa	Terisinya kekosongan Kades dan Perangkat Desa	1.000.000	13 desa	100%	12.490.000	13 desa	4.500.000	13 desa	5.000.000	13 desa	6.000.000	13 desa	8.000.000	13 desa	10.000.000
			b Rapat Koordinasi Kades dan Perangkat Desa	Terciptanya koordinasi antar Kades dan Perangkat Desa	4.680.000	13 desa	100%	4.700.000	13 desa	6.000.000	13 desa	5.200.000	13 desa	6.240.000	13 desa	6.760.000	13 desa	7.280.000
			c Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan	Meningkatnya SDM Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan	-			-			13 desa	3.900.000	13 desa	4.680.000	13 desa	5.070.000	13 desa	5.460.000
			d Fasilitasi Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pelantikan BPD antar Waktu	Terisinya kekosongan Anggota BPD	-			-		-	13 desa	2.250.000	13 desa	2.500.000	13 desa	2.750.000	13 desa	3.000.000
			KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL															

	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Lainnya	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Lainnya	16	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan persentase penanganan pengaduan masyarakat														
			a	Fasilitasi Administrasi Kependudukan	Terwujudnya tertib administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	10.212.600		-	13 desa	4.500.000	13 desa	2.600.000	13 desa	5.500.000	13 desa	6.000.000	13 desa	6.500.000	
			PERENCANAAN																
	Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pengkajian Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pengkajian Pembangunan Daerah	17	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rasio Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah														
			a	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tepat waktu	-	0	0	-	12 bulan	-	12 bulan	750.000	12 bulan	2.250.000	12 bulan	2.500.000	12 bulan	2.750.000
			STATISTIK																

	Meningkatkan Kualitas Data Pembangunan dan Data Statistik Daerah	Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan dan Data Statistik Daerah	18	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Besaran ketersediaan data statistik														
			a	Fasilitasi Penyusunan dan pemberdayaan profil desa/kelurahan	Tersusunnya Profil Desa/Kelurahan	-	13 desa	100%	3.000.000	13 desa	4.000.000	13 desa	3.900.000	13 desa	3.000.000	13 desa	3.500.000	13 desa	4.000.000
			b	Penyusunan Profil Kecamatan/Penyusunan data statistic	Tersusunnya Profil Kecamatan	3.000.000			-			1 tahun	2.600.000	1 tahun	3.575.000	1 tahun	3.900.000	1 tahun	4.225.000
																			100%

	Nama Pejabat Eselon (Satu Tingkat di Bawah Kepala SKPD)	Paraf
1	HARI NUGROHO, S.Sos MM	
2		
3		
4		
Dst		

Temanggung, 10 Maret 2013
CAMAT BANSARI

SINGGIH PURNOMO HADI, S.Sos MM

NIP. 19580517 198503 1 011

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bansari
Kabupaten Temanggung**

NO	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Terciptanya ketahanan pangan					13 Desa	13 Desa			13 Desa	13 Desa	Pencapaian target 100 %
2	Penurunan kasus SARA dan persentase peserta kegiatan politik masyarakat					13 Desa	13 Desa			13 Desa	13 Desa	Pencapaian target 100 %
3	Penanganan bencana alam					13 Desa	13 Desa			13 Desa	13 Desa	Pencapaian target 100 %
4	Cakupan fasilitas pelaksanaan tri kerukunan umat beragama dan cakupan fasilitasi pelaksanaan pelaksanaan peribadatan					13 Desa	13 Desa			13 Desa	13 Desa	Pencapaian target 100 %
5	Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam teknologi tepat guna dan persentase menurunnya rumah tangga sasaran					13 Desa	13 Desa			13 Desa	13 Desa	Pencapaian target 100 %
6	Cakupan perencanaan pembangunan desa yang partisipatif dan persentase rumah tangga sasaran dalam Musrenbang					13 desa	13 desa			13 desa	13 desa	Pencapaian target 100 %
7	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti					13 Desa	13 Desa			13 Desa	13 Desa	Pencapaian target 100 %
8	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa tingkat dasar					1 SD/MI	1 SD/MI			1 SD/MI	1 SD/MI	Pencapaian target 100 %

NO	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	
9	Persentase anggaran penata usahaan SKPD terhadap total belanja langsung SKPD dalam 1 (satu) tahun					100 %	100 %			100 %	100 %	Pencapaian target 100 %
10	Rasio realisasi pendapatan daerah terhadap potensi pendapatan daerah					13 desa	13 desa			13 desa	13 desa	Pencapaian target 100 %
11	Persentase tersusunnya dokumen pelaporan daerah					100 %	100 %			100 %	100 %	Pencapaian target 100 %
12	Cakupan pembinaan administrasi desa					13 Desa	13 Desa			13 Desa	13 Desa	Pencapaian target 100 %
13	Persentase pengisian jabatan kepala desa yang kosong dan Persentase pengisian jabatan perangkat desa yang kosong					100 %	100 %			100 %	100 %	Pencapaian target 100 %
14	Cakupan penertiban Kartu Keluarga (KK),Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran,Akta Kematian dan persentase penanganan pengaduan masyarakat					13 Desa	13 Desa			13 Desa	13 Desa	Pencapaian target 100 %
15	Rasio dokumen perencanaan pembangunan daerah					100 %	100 %			100 %	100 %	Pencapaian target 100 %
16	Besaran ketersediaan data statistik					13 Desa	13 Desa			13 Desa	13 Desa	Pencapaian target 100 %
17	Tertib administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan			13 Desa	13 Desa			13 Desa	13 Desa			Pencapaian target 100 %
18	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat			1 SD/MI	1 SD/MI			1 SD/MI	1 SD/MI			Pencapaian target 100 %
19	Terpenuhi target pendapatan 100 %			100	100			100	100			Pencapaian target 100 %
20	Berkurangnya angka			13 Desa	13 Desa			13 Desa	13 Desa			Pencapaian target

NO	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	
	kriminal di Desa / Kelurahan											100 %
21	Tumbuhnya wawasan kebangsaan di masyarakat			100	100			100	100			Pencapaian target 100 %
22	Meningkatnya kesejahteraan pegawai			100	100			100	100			Pencapaian target 100 %
23	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur pemerintah kecamatan			100	100			100	100			Pencapaian target 100 %
24	Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah kecamatan			100	100			100	100			Pencapaian target 100 %

LAMPIRAN II

BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN FORUM KECAMATAN BANSARI
PENYUSUNAN RENSTRA KECAMATAN BANSARI
KABUPATEN TEMANGGUNG

Pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2014 sampai dengan hari Senin tanggal 10 Maret 2014 telah diselenggarakan forum penyusunan Renstra Kecamatan Bansari yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan :

1..Pemaparan materi :

- a. VISI Kabupaten Temanggung dan Isu Isu Strategis disampaikan oleh Camat Bansari Kabupaten Temanggung (Singgih Purnomo Hadi, S.Sos MM)
- b. Misi 1. Mewujudkan pertanian modern yang berwawasan lingkungan disampaikan oleh Kasi PMD (Sri Haryati, BA)
- c. Misi 2. Mewujudkan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang agamis,Berbudaya dan sejahtera disampaikan oleh Kasi Pemerintahan (Sri Rahayu, S.Sos)
- d. Misi 3. Mewujudkan Infrastruktur Permukiman Perdesaan dan Perkotaan yang Layak dan Berwawasan Lingkungan disampaikan oleh Kasi PMD (Sri Haryati, BA)

- e. Misi 5 . Mewujudkan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan disampaikan oleh Kasi Kesmas (Mujirah, S.Sos)
- f. Misi 6. Mewujudkan Pemerintahan yang bersih ,Transparan tidak KKN dan berorientasi pada Pelayanan Publik disampaikan oleh sekretaris Kecamatan kabupaten Temanggung Temanggung (Hari Nugroho, S.Sos MM)

2..Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Kecamatan Bansari terhadap materi yang dipaparkan oleh Camat, Sekcam dan Kasi, sebagaimana diskusi telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok, maka pada :

Hari dan Tanggal : Senin Tanggal 10 Maret 2014
Jam :10.00 WIB
Tempat :Aula Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung

MENYEPAKATI

- KESATU : Isu strategis (pelayanan) Kecamatan Bansari , tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan pelayanan rancangan renstra Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran berita acara ini.
- KEDUA : Rencana program dan kegiatan prioritas Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Tahun 2014 - 2018 yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam lampiran berita acara ini.
- KETIGA : Indikator kinerja Kecamatan Bansari yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran berita acara ini.
- KEEMPAT : Hasil kesepakatan sidang – sidang kelompok forum Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara ini.
- KELIMA : Berita acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan renstra Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bansari, 10 Maret 2014

CAMAT BANSARI
Selaku pimpinan sidang Forum
Kecamatan Bansari

SINGGIH PURNOMO HADI, S.Sos MM

NIP. 19580517 198503 1 011

LAMPIRAN III



LAMPIRAN III : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM
KECAMATAN BANSARI

NOMOR :

TANGGAL : 10 Maret 2014

Penyusun Renstra Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018

NO	Nama	Lembaga / instansi	Jabatan / Alamat	Tanda Tangan
1	Singgih Purnomo Hadi, S.Sos MM	Kecamatan Bansari	Camat	1.
2	Hari Nugroho, S.Sos	Kecamatan Bansari	Sekretaris Kecamatan	2
3	Sri Rahayu, S.Sos	Kecamatan Bansari	Kasi Pemerintahan	3
4	Sri haryati, BA	Kecamatan Bansari	Kasi PMD	4
5	Mujirah, S.Sos	Kecamatan Bansari	Kasi Kesmas	5
6	Sri Suharyani, S.Sos	Kecamatan Bansari	Ka Subbag Perencanaan	6
7	Try Puryanto	Kecamatan Bansari	Kasubbag Keuangan	7
8	Widjiarti	Kecamatan Bansari	Kasubbag Umum & Kepeg	8

Bansari, 10 Maret 2014

CAMAT BANSARI
Selaku pimpinan sidang Forum

Kecamatan Bansari

SINGGIH PURNOMO HADI, S.Sos MM

LAMPIRAN IV



Daftar hadir Penyusun Renstra Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018

Tanggal : Maret 2014

NO	Nama	Lembaga / instansi	Jabatan / Alamat	Tanda Tangan
1	Singgih Purnomo Hadi, S.Sos MM	Kecamatan Bansari	Camat	1.
2	Hari Nugroho, S.Sos	Kecamatan Bansari	Sekretaris Kecamatan	2

3	Sri Rahayu, S.Sos	Kecamatan Bansari	Kasi Pemerintahan	3
4	Sri haryati, BA	Kecamatan Bansari	Kasi PMD	4
5	Mujirah, S.Sos	Kecamatan Bansari	Kasi Kesmas	5
6	Sri Suharyani, S.Sos	Kecamatan Bansari	Ka Subbag Perencanaan	6
7	Try Puryanto	Kecamatan Bansari	Kasubbag Keuangan	7
8	Widjiarti	Kecamatan Bansari	Kasubbag Umum & Kepeg	8

Bansari, Maret 2014

CAMAT BANSARI
Selaku pimpinan sidang Forum
KECAMATAN BANSARI

SINGGIH PURNOMO HADI, S.Sos MM

Daftar Hadir Penyusun Renstra Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018

Tanggal : Januari 2014

NO	Nama	Lembaga / instansi	Jabatan / Alamat	Tanda Tangan
1	Singgih Purnomo Hadi, S.Sos MM	Kecamatan Bansari	Camat	1.
2	Hari Nugroho, S.Sos	Kecamatan Bansari	Sekretaris Kecamatan	2
3	Sri Rahayu, S.Sos	Kecamatan Bansari	Kasi Pemerintahan	3
4	Sri haryati, BA	Kecamatan Bansari	Kasi PMD	4
5	Mujirah, S.Sos	Kecamatan Bansari	Kasi Kesmas	5
6	Sri Suharyani, S.Sos	Kecamatan Bansari	Ka Subbag Perencanaan	6
7	Try Puryanto	Kecamatan Bansari	Kasubbag Keuangan	7
8	Widjiarti	Kecamatan Bansari	Kasubbag Umum & Kepeg	8

Bansari, Maret 2014

CAMAT BANSARI
Selaku pimpinan sidang Forum
KECAMATAN BANSARI

SINGGIH PURNOMO HADI, S.Sos MM

Daftar hadir Penyusun Renstra Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Tahun 2013 – 2018

Tanggal : Pebruari 2014

NO	Nama	Lembaga / instansi	Jabatan / Alamat	Tanda Tangan
1	Singgih Purnomo Hadi, S.Sos MM	Kecamatan Bansari	Camat	1.
2	Hari Nugroho, S.Sos	Kecamatan Bansari	Sekretaris Kecamatan	2
3	Sri Rahayu, S.Sos	Kecamatan Bansari	Kasi Pemerintahan	3
4	Sri haryati, BA	Kecamatan Bansari	Kasi PMD	4
5	Mujirah, S.Sos	Kecamatan Bansari	Kasi Kesmas	5
6	Sri Suharyani, S.Sos	Kecamatan Bansari	Ka Subbag Perencanaan	6
7	Try Puryanto	Kecamatan Bansari	Kasubbag Keuangan	7
8	Widjiarti	Kecamatan Bansari	Kasubbag Umum & Kepeg	8

Bansari, Maret 2014

CAMAT BANSARI
Selaku pimpinan sidang Forum

KECAMATAN BANSARI

SINGGIH PURNOMO HADI, S.Sos MM

Daftar Hadir Penyusun Renstra Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Tahun 2013 – 2018
Tanggal : 7 Maret 2014

NO	Nama	Lembaga / instansi	Jabatan / Alamat	Tanda Tangan
1	Singgih Purnomo Hadi, S.Sos MM	Kecamatan Bansari	Camat	1.

2	Hari Nugroho, S.Sos	Kecamatan Bansari	Sekretaris Kecamatan	2
3	Sri Rahayu, S.Sos	Kecamatan Bansari	Kasi Pemerintahan	3
4	Sri haryati, BA	Kecamatan Bansari	Kasi PMD	4
5	Mujirah, S.Sos	Kecamatan Bansari	Kasi Kesmas	5
6	Sri Suharyani, S.Sos	Kecamatan Bansari	Ka Subbag Perencanaan	6
7	Try Puryanto	Kecamatan Bansari	Kasubbag Keuangan	7
8	Widjiarti	Kecamatan Bansari	Kasubbag Umum & Kepeg	8

Bansari, Maret 2014

CAMAT BANSARI
Selaku pimpinan sidang Forum
KECAMATAN BANSARI

SINGGIH PURNOMO HADI, S.Sos MM

LAMPIRAN V

LAMPIRAN V : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM SKPD
NOMOR :
TANGGAL : 10 Maret 2014

NO	Nama	Lembaga / instansi	Jabatan / Alamat	Tanda Tangan
1	Singgih Purnomo Hadi, S.Sos MM	Kecamatan Bansari	Camat	1.
2	Hari Nugroho, S.Sos	Kecamatan Bansari	Sekretaris Kecamatan	2

3	Sri Rahayu, S.Sos	Kecamatan Bansari	Kasi Pemerintahan	3
4	Sri haryati, BA	Kecamatan Bansari	Kasi PMD	4
5	Mujirah, S.Sos	Kecamatan Bansari	Kasi Kesmas	5
6	Sri Suharyani, S.Sos	Kecamatan Bansari	Ka Subbag Perencanaan	6
7	Try Puryanto	Kecamatan Bansari	Kasubbag Keuangan	7
8	Widjiarti	Kecamatan Bansari	Kasubbag Umum & Kepeg	8

Bansari, Maret 2014

CAMAT BANSARI
Selaku pimpinan sidang Forum
KECAMATAN BANSARI

SINGGIH PURNOMO HADI, S.Sos MM

LAMPIRAN V : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN
FORUM KOMUNIKASI KECAMATAN BANSARI

NOMOR :

TANGGAL : 10 Maret 2014

Rekapitulasi Hasil Pembahasan Kelompok Forum Kecamatan Bansari terhadap
Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Renstra Kecamatan Bansari Tahun 2013 – 2018

Kabupaten Temanggung

Tanggal : 10 Maret 2014

Tempat : Aula Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung

ISU STRATEGIS :

1. Belum optimalnya pelayanan public;
2. Belum optimalnya pengelolaan administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan, pengelolaan asset, dan pengelolaan kearsipan;
3. Menurunnya pengamalan budi pekerti, tata krama, nilai budaya, dan keteladanan;
4. Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan pendidikan;
5. Belum optimalnya pemerataan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;
6. Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi dan inovasi pertanian, pengembangan insfrastruktur pertanian dan pengembangan pertanian yang berwawasan lingkungan;
7. Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
8. Belum optimalnya pemenuhan lingkungan hunian/permukiman yang bersih dan sehat;
9. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan olahraga;
10. Belum optimalnya pemerataan pembangunan insfrastruktur daerah.

VISI : MEWUJUDKAN KECAMATAN BANSARI MENUJU TEMANGGUNG SEBAGAI DAERAH AGRARIS, BERWAWASAN LINGKUNGAN, MEMILIKI MASYARAKAT AGAMIS, BERBUDAYA, DAN SEJAHTERA DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH			
Misi 1. Mewujudkan pertanian modern yang berwawasan lingkungan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Ketahanan pangan	Meningkatnya ketahanan pangan	Peningkatan ketahanan pangan dari aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan	Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, difersifikasi konsumsi dan keamanan pangan, serta penanganan kerawanan pangan
Misi 2. Mewujudkan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang Agamis, Berbudaya, dan sejahtera			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas kehidupan politik, wawasan kebangsaan, keamanan dan ketertiban	Meningkatnya kualitas kehidupan politik dan wawasan kebangsaan	Peningkatan ketertiban dan keamanan	Meningkatkan ketertiban dan keamanan melalui penegakan Peraturan daerah, penurunan angka kriminalitas, penanganan demonstrasi, dan patroli siaga serta ketersediaan tenaga linmas di masyarakat
Meningkatkan pengetahuan di bidang bencana alam	Meningkatnya pengetahuan bencana alam	Penimngkatan pencegahan penanggulangan dan penanganan bencana	Meningkatkan upaya penanganan terhadap bencana alam
Meningkatkan kualitas iman dan taqwa	Meningkatnya kualitas iman dan taqwa	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana keagamaan	Meningkatkan pemberian bantuan sarana dan prasarana pendukung kegiatan keagamaan
Meningkatkan pemberdayaan	Meningkatnya keberdayaan	Peningkatan kualitas dan kuantitas	Meningkatkan kualitas dan kuantitas

masyarakat perdesaan	masyarakat perdesaan	pemberdayaan masyarakat	pemberdayaan masyarakat, dan pengurangan angka kemiskinan, serta peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat
Misi 3. Mewujudkan peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan dan Perkotaan yang Layak dan Berwawasan Lingkungan			
Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	Peningkatan kelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup khususnya penanganan dan pencegahan pencemaran air, udara dan tanah
Misi 5. Mewujudkan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan penyehatan lingkungan	Meningkatnya perilaku hidup sehat	Peningkatan lingkungan sehat	Meningkatkan lingkungan sehat melalui pengembangan akses yang berkelanjutan terhadap sanitasi dasar di perkotaan dan perdesaan, akses terhadap air bersih, dan penggunaan jamban keluarga
Misi 6. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Meningkatnya kinerja penyelenggara pemerintahan daerah	Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama pada sisi pemenuhan ketersediaan peraturan perundang undangan, penanganan temuan pemeriksaan, ketepatan pelaksanaan pembangunan, dan pelaporan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan

Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Peningkatan tertib administrasi penyelenggara pemerintahan daerah	Peningkatan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintah desa
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme	Meningkatnya kemampuan, profesionalisme, kesejahteraan SDM aparatur	Peningkatan kemampuan, profesionalisme, dan kesejahteraan SDM Aparatur	Meningkatkan kemampuan, profesionalisme, dan kesejahteraan SDM Aparatur melalui diklat pegawai, meningkatnya pendidikan formal pegawai, pemenuhan hak dan penghargaan pegawai, dan pengisian jabatan struktural yang kosong
Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya
Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah	Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah yang terpadu dan partisipatif
Meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah	Meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah	Peningkatan kualitas data pembangunan dan data statistik daerah	Meningkatkan kualitas data pembangunan dan data statistik daerah yang akan digunakan dalam perencanaan pembangunan setiap tahunnya

MISI	Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Daerah (Indikator Program) dan Indikator Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2012	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												
						2013 (Sesuai APBD 2013)			2014 (sesuai DPA 2014)		2015		2016		2017		2018	
						Tar get	prediksi capaian	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			BELANJA TIDAK LANGSUNG															
			Belanja hibah Program Pagu Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Program PWK di Desa/Kelurahan	500.000	4 desa	100%	404.600.000	2 Desa	422.000.000	11 Desa	479.000.000	3 desa	508.400.000	3 desa	550.600.000	4 desa	592.800.000
			BELANJA LANGSUNG															
MISI I			1. KETAHANAN PANGAN															
Mewujudkan pertanian modern yang berwawasan lingkungan	Meningkatkan ketahanan pangan	Meningkatnya ketahanan pangan	Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan	Terciptanya ketahanan pangan														
			a Pendampingan program raskin	Terfasilitasinya pendampingan raskin	-	0	0	-	13 desa	3.000.000	13 desa	2.600.000	13 desa	2.860.000	13 desa	3.120.000	13 desa	3.380.000
MISI 2			2.KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI															

Mewujudkan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Politik, Wawasan Kebangsaan, Keamanan, dan Ketertiban	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Politik Wawasan Kebangsaan	1 Program pemeliharaan kantrantibman dan pencegahan tindak kriminal	Penurunan kasus SARA dan Peningkatan Partisipasi Pemilih															
			a Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dan berkurangnya tindak kriminalitas	18.000.000	13 desa	100%	24.720.000	13 desa	24.960.000	13 desa	27.456.000	13 desa	29.952.000	13 desa	32.448.000	13 desa	34.944.000	
			b Pembinaan Hansip/Linmas Desa/Kelurahan	Terbinanya anggota Hansip/Linmas di Desa/Kelurahan	1.985.000	13 desa	100%	3.000.000	13 desa	3.500.000	13 desa	4.875.000	13 desa	6.240.000	13 desa	6.760.000	13 desa	7.280.000	
			c Pemantauan Kegiatan Pemilukada di Tingkat kecamatan	Meningkatnya kondusifitas wilayah dan meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilukada	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	100 %	26.000.000	
			2 Program pencegahan dini dan penanggulangan bencana alan	Penanganan bencana alam															

	Meningkatkan pengetahuan di bidang bencana alam	Meningkatnya pengetahuan bencana alam	Sosialisasi Bencana alam	Terlaksananya kegiatan sosialisasi bencana alam	-	0	0	-	13 desa	2.000.000	13 desa	2.600.000	13 desa	4.000.000	13 desa	4.500.000	13 desa	5.000.000	
			3.KEBUDAYAAN																
	Meningkatkan Kualitas Iman dan Taqwa	Meningkatnya Kualitas Iman dan Taqwa	Program Pengembangan Nilai Keagamaan	Cakupan Fasilitas Pelaksanaan Tri Kerukunan Umat Beragama dan Cakupan Fasilitas Pelaksanaan Peribadahan															
			a	Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama dan SKB 3 Menteri	Terciptanya kerukunan antar umat beragama	2.000.000	13 desa	100%	3.000.000	13 desa	3.000.000	13 desa	2.600.000	13 desa	3.500.000	13 desa	4.000.000	13 desa	4.500.000
			b	Fasilitas Kegiatan Keagamaan	Meningkatnya kualitas kegiatan keagamaan	-	0	0	-	0	-	13 desa	1.300.000	13 desa	3.500.000	13 desa	3.750.000	13 desa	4.000.000
			4.PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																

	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Cakupan Pemberdayaan masyarakat dalam Teknologi Tepat Guna, Persentase Menurunnya Rumah Tangga Sasaran														
			Pemberdayaan Lembaga Organisasi Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan	Meningkatnya kuantitas/kualitas kelembagaan Desa/Kelurahan	-	13 desa	100%	3.000.000	13 desa	5.000.000	13 desa	6.500.000	13 desa	2.860.000	13 desa	3.120.000	13 desa	3.380.000
			Fasilitasi Kegiatan Pendampingan Desa Binaan	Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan	1.500.000	1 tahun	100%	1.500.000	1 tahun	3.000.000	1 tahun	4.000.000	1 tahun	4.400.000	1 tahun	4.800.000	1 tahun	5.200.000
			Fasilitasi Pagu Wilayah Kecamatan	Terlaksananya kegiatan Program PWK dalam rangka percepatan pembangunan	4.395.000	1 tahun	100%	5.000.000	1 tahun	5.500.000	1 tahun	6.000.000	1 tahun	5.000.000	1 tahun	5.000.000	1 tahun	5.000.000
			Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan/Perkotaan (PNPM-MP)	Terlaksananya kegiatan PNPM-MP Perdesaan/Perkotaan dalam rangka percepatan pembangunan	3.900.000	13 desa	100%	3.900.000	13 desa	4.500.000	13 desa	5.200.000	13 desa	5.720.000	13 desa	6.240.000	13 desa	6.760.000

			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa/Kelurahan	Cakupan Perencanaan Pembangunan Desa yang Partisipatif dan Persentase Partisipasi Rumah Tangga Sasaran dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa														
			a Fasilitasi dan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan dan tingkat kecamatan	Telaksananya Musrenbang di tingkat Desa/Kelurahan dan Tingkat Kecamatan	3.192.500	13 desa	100%	5.000.000	13 desa	6.000.000	13 desa	6.500.000	13 desa	6.435.000	13 desa	7.020	13 desa	7.605.000
			b Fasilitasi Penyusunan RPJMDes	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah desa yang partisipatif	-	0	0	-	13 desa	2.500.000	-	0	-	0	-	0	-	
			c Fasilitasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	Telaksananya pembinaan kepengurusan PKK Desa							13 desa	4.550.000	13 desa	6.500.000	13 desa	7.000.000	13 desa	7.500.000

			Fasilitasi Penyusunan RKP Desa	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah desa yang partisipatif	-	0	0	-			13 desa	2.600.000	13 desa	3.000.000	13 desa	3.500.000	13 desa	4.000.000	
MISI 3			5.LINGKUNGAN HIDUP																
Mewujudkan Infrastruktur Permukiman Perdesaan dan Perkotaan yang Layak dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	Program Pengendalian dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti															
			a Fasilitasi Gerakan Budaya Sehat dan Kebersihan Lingkungan	Terciptanya kebersihan lingkungan Desa/Kelurahan	-			-		-	13 desa	2.600.000	13 desa	3.000.000	13 desa	3.500.000	13 desa	4.000.000	
MISI 5			6..KESEHATAN																
Mewujudkan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan Penyehatan Lingkungan	Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat	1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa Tingkat Dasar															
			a Pembinaan UKS/LSS	Terciptanya perilaku hidup bersih dan sehat serta lingkungan sehat di lingkungan Sekolah Dasar	997.500	1 tahun	100%	1.200.000	1 tahun	2.500.000	1 tahun	2.500.000	1 tahun	3.000.000	1 tahun	3.500.000	1 tahun	4.000.000	
MISI 6			7.OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN																

Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Anggaran Penatausahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) Tahun														
			a Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya layanan surat menyurat perkantoran	-	0	0	-	0	-	1 tahun	5.000.000	1 tahun	5.000.000	1 tahun	6.000.000	1 tahun	6.000.000
			b Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik	6.453.641	1 tahun	100%	8.000.000	1 tahun	15.000.000	1 tahun	15.000.000	1 tahun	16.000.000	1 tahun	17.500.000	1 tahun	20.000.000
			c Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa, alat, dan bahan kebersihan	4.500.000	1 tahun	100%	6.300.000	1 tahun	7.500.000	1 tahun	9.000.000	1 tahun	10.000.000	1 tahun	11.000.000	1 tahun	12.000.000
			d Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	5.617.000	1 tahun	100%	7.000.000	1 tahun	7.500.000	1 tahun	10.000.000	1 tahun	10.000.000	1 tahun	11.000.000	1 tahun	12.000.000
			e Penyediaan barang dan pengadaan	Tersedianya bahan cetakan dan pengadaan	2.496.300	1 tahun	100%	3.500.000	1 tahun	4.000.000	1 tahun	5.000.000	1 tahun	7.000.000	1 tahun	8.000.000	1 tahun	9.000.000
			f Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	2.465.000	1 tahun	100%	2.500.000	1 tahun	3.000.000	1 tahun	5.000.000	1 tahun	6.000.000	1 tahun	7.000.000	1 tahun	8.000.000
			g Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	900.000	1 tahun	100%	900.000	1 tahun	999.000	1 tahun	1.200.000	1 tahun	2.000.000	1 tahun	2.500.000	1 tahun	3.000.000

			h Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu,	10.914.000	1 tahun	100%	12.000.000	1 tahun	15.000.000	1 tahun	18.000.000	1 tahun	18.000.000	1 tahun	20.000.000	1 tahun	20.000.000
				Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk persiapan hari-hari besar Nasional dan agama							1 tahun	2.500.000	1 tahun	3.000.000	1 tahun	3.500.000	1 tahun	4.000.000
			i Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas tetap	15.525.000	1 tahun	100%	16.200.000	1 tahun	16.200.000	1 tahun	20.000.000	1 tahun	20.000.000	1 tahun	22.000.000	1 tahun	22.000.000
			i Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas tetap							1 tahun	10.000.000	1 tahun	12.000.000	1 tahun	14.000.000	1 tahun	16.000.000
			j Jasa Pelayanan perkantoran	Tersedianya honorarium/upah tenaga kerja dan uang lembur	-	0	0	-	0%	-	1 tahun	3.000.000	1 tahun	4.000.000	1 tahun	5.000.000	1 tahun	6.000.000
			2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Anggaran Penatausahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) Tahun														
			a Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	-	0	0	-			6 set	2000000 (Mebelair)	1 tahun	50.000.000	1 tahun	50.000.000	1 tahun	50.000.000
												5000000 (penangkal petir)						

			b	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	9.667.000	1 tahun	100%	16.000.000	1 tahun	15.000.000	1 Laptop	7.500.000	1 tahun	15.000.000	1 tahun	20.000.000	1 tahun	20.000.000
			c	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Rumah Dinas	6.000.000	1 tahun	100%	6.000.000	1 tahun	6.500.000	1 tahun	7.500.000	1 tahun	10.000.000	1 tahun	10.000.000	1 tahun	15.000.000
			d	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/operasional	10.443.000	1 tahun	100%	20.500.000	1 tahun	20.000.000	1 tahun	20.000.000	1 tahun	25.000.000	1 tahun	28.000.000	1 tahun	30.000.000
			e	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	-	1 tahun	100%	-	1 tahun	-	1 tahun	2.500.000	1 tahun	3.000.000	1 tahun	4.000.000	1 tahun	5.000.000
			f	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	-	1 tahun	100%	-	1 tahun	-	1 tahun	2.500.000	1 tahun	4.000.000	1 tahun	5.000.000	1 tahun	6.000.000
			g	Pemeliharaan rutin/berkala rumah Dinas Camat	Terpeliharanya rumah dinas	2.500.000	1 tahun	100%	2.500.000	1 tahun	3.000.000	1 tahun	4.000.000	1 tahun	5.000.000	1 tahun	6.000.000	1 tahun	7.000.000
			h	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	50.000.000	1 tahun	100%	22.500.000	1 tahun	105.000.000	1 bidang	50000000 (Mushola)	1 tahun	100.000.000	0%	-	1 tahun	100.000.000
			i	Pengadaan perlengkapan rumah dinas	Tersedianya sarana dan prasaranarumah dinas Camat							1 paket	20.000.000	1 tahun	25.000.000	0%	25.000.000	1 tahun	30.000.000

			3 Program peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Anggaran Penata usahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) Tahun														
			a Pengadaan pakaian khusus tertentu	Terciptanya disiplin aparatur	3.600.000	0	0	-	29 org	5.800.000	29 org	-	29 org	7.250.000	0	-	29 org	9.000.000
			Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Rasio Realisasi Pendapatan Daerah Terhadap Potensi Pendapatan Daerah dan Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah														
			a Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Terpenuhinya target pendapatan daerah	5.500.000	13 desa	100%	18.564.000	13 desa	25.000.000	13 desa	30.000.000	13 desa	30.000.000	13 desa	32.000.000	13 desa	32.000.000
			b Fasilitasi Pemakaman Umum	Terpenuhinya target pendapatan daerah	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	-
		Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Tersusunnya dokumen pelaporan daerah														

			a	Fasilitasi dan verifikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu di Kecamatan	14.900.000	12 bulan	100%	15.000.000	12 bulan	15.000.000	12 bulan	5.000.000	12 bulan	5.500.000	12 bulan	6.000.000	12 bulan	6.500.000
			b	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan tingkat Kecamatan	Terselenggaranya pemantauan kegiatan pembangunan yang berlokasi di kecamatan	-	0	0	-	0	-	12 bulan	2.500.000	12 bulan	3.600.000	12 bulan	3.900.000	12 bulan	4.200.000
	Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Cakupan Pembinaan Administrasi Desa														
			a	Fasilitasi dan Evaluasi Peraturan Desa tentang APBDes	Terlaksananya pembinaan dan tertib administrasi keuangan desa	1.300.000	13 desa	100%	1.300.000	13 desa	2.600.000	13 desa	3.250.000	13 desa	3.120.000	13 desa	3.380.000	13 desa	3.640.000
			b	Pembinaan administrasi desa	Terlaksananya pembinaan dan tertib administrasi desa	-			-	13 desa	4.000.000	13 desa	6.000.000	13 desa	6.000.000	13 desa	7.500.000	13 desa	7.500.000
			c	Fasilitasi Alokasi Dana Desa (ADD)	Terlaksananya pembinaan dan tertib administrasi keuangan desa	3.072.000	13 desa	100%	5.200.000	13 desa	6.500.000	13 desa	6.500.000	13 desa	7.020.000	13 desa	7.605.000	13 desa	8.190.000

	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme	Meningkatnya Kemampuan, Profesionalisme, dan Kesejahteraan SDM Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Persentase Pengisian Jabatan Kepala Desa yang Kosong dan Persentase Pengisian Jabatan Kepala Desa yang Kosong															
			a Fasilitasi Pengisian Kades dan Perangkat Desa	Terisinya kekosongan Kades dan Perangkat Desa	1.000.000	13 desa	100%	12.490.000	13 desa	4.500.000	13 desa	5.000.000	13 desa	6.000.000	13 desa	8.000.000	13 desa	10.000.000	
			b Rapat Koordinasi Kades dan Perangkat Desa	Terciptanya koordinasi antar Kades dan Perangkat Desa	4.680.000	13 desa	100%	4.700.000	13 desa	6.000.000	13 desa	5.200.000	13 desa	6.240.000	13 desa	6.760.000	13 desa	7.280.000	
			c Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan	Meningkatnya SDM Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan	-			-			13 desa	3.900.000	13 desa	4.680.000	13 desa	5.070.000	13 desa	5.460.000	
			d Fasilitasi Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pelantikan BPD antar Waktu	Terisinya kekosongan Anggota BPD	-			-		-	13 desa	2.250.000	13 desa	2.500.000	13 desa	2.750.000	13 desa	3.000.000	
			8.KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL																
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Lainnya	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Lainnya	1 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan persentase penanganan pengaduan masyarakat															
			a Fasilitasi Administrasi Kependudukan	Terwujudnya tertib administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	10.212.600			-	13 desa	4.500.000	13 desa	2.600.000	13 desa	5.500.000	13 desa	6.000.000	13 desa	6.500.000	

9.PERENCANAAN																		
Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pengkajian Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pengkajian Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rasio Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah															
		a Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tepat waktu	-	0	0	-	12 bulan	-	12 bulan	750.000	12 bulan	2.250.000	12 bulan	2.500.000	12 bulan	2.750.000	
10.STATISTIK																		
Meningkatkan Kualitas Data Pembangunan dan Data Statistik Daerah	Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan dan Data Statistik Daerah	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Besaran ketersediaan data statistik															
		a Fasilitasi Penyusunan dan pemberdayaan profil desa/kelurahan	Tersusunnya Profil Desa/Kelurahan	-	13 desa	100%	3.000.000	13 desa	4.000.000	13 desa	3.900.000	13 desa	3.000.000	13 desa	3.500.000	13 desa	4.000.000	
		b Penyusunan Profil Kecamatan/ Penyusunan data statistik	Tersusunnya Profil Kecamatan	3.000.000			-			1 tahun	2.600.000	1 tahun	3.575.000	1 tahun	3.900.000	1 tahun	4.225.000	
																		100%

Nama Pejabat Eselon (Satu Tingkat di Bawah Kepala SKPD)	Paraf
1 HARI NUGROHO, S.Sos MM	
2 SRI HARYATI, BA	
3 MUJIRAH, S.Sos	
4 SRI RAHAYU, S.Sos	
5. SRI SUHARYANI, S.Sos	

Temanggung, 10 Maret 2014
CAMAT BANSARI

SINGGIH PURNOMO HADI, S.Sos MM

NIP. 19580517 198503 1
011

